



**PERUBAHAN KELEMBAGAAN EKONOMI INDUSTRI PENGRAJIN
BATIK KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI DINAMIKA
PENDAPATAN, HUBUNGAN KERJA DAN AKSESIBILITAS PASAR)**

*The Changes In Economic Institutions of Industrial Craftsmen Batik In
Banyuwangi District (The Dynamics Study of Income, Employment and Market
Accessibility)*

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi

OLEH: YATI MUSTIKA

NIM. 130820201013

**MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PERUBAHAN KELEMBAGAAN EKONOMI INDUSTRI PENGRAJIN
BATIK KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI DINAMIKA
PENDAPATAN, HUBUNGAN KERJA DAN AKSESIBILITAS PASAR)**

*The Changes In Economic Institutions of Industrial Craftsmen Batik In
Banyuwangi District (The Dynamics Study of Income, Employment and Market
Accessibility)*

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi

OLEH: YATI MUSTIKA

NIM. 130820201013

**MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini disetujui

Tanggal : 22 Mei 2016

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Siti Komariyah, SE, MSi

NIP. 19710610 20012 2 002

Pembimbing Anggota

Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si

NIP: 19740913200112001

Mengetahui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Siti Komariyah, SE, MSi

NIP. 19710610 20012 2 002

HALAMAN PENGESAHAN TESIS**PERUBAHAN KELEMBAGAAN EKONOMI INDUSTRI PENGRAJIN
BATIK KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI DINAMIKA
PENDAPATAN, HUBUNGAN KERJA DAN AKSESIBILITAS PASAR)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yati Mustika
NIM. : 130820201013
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Daerah

telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal :

04 Juni 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan memperoleh Magister Ilmu Ekonomi pada program studi S-2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember

Susunan Tim Penguji

Ketua

Anggota I

Dr. Zainuri, M.Si

Dr. Siswoyo Hari Santosa, SE., M.Si

NIP. 196403251989021001

NIP. 196807151993031001

Anggota II

Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si

NIP. 196907181995122001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

NIP. 19630614 199002 1 001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yati Mustika

NIM : 130820201013

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Perubahan Kelembagaan Ekonomi Industri Pengrajin Batik Kabupaten Banyuwangi (Studi Dinamika Pendapatan, Hubungan Kerja Dan Aksesibilitas Pasar)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juni 2016

Yang menyatakan,



Yati Mustika, S.E.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya kepadaku
2. Suamiku Huzaini, SE yang telah memberikan dorongan spirit dan materi serta pengorbanan.
3. Anaku-anaku Dina Kartika Putri dan Nabila Muntaz yang turut membantu doa dan juga spirit.
4. Ibuku tercinta Hj. Aisyah yang selalu mendoakan
5. Teman-temanku Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2013
6. Almamaterku Tercinta.



HALAMAN MOTTO

*Thinking, Does And Prays Is Business Which Have Never Been Finished
Does Admittedly Will Become One Candidness In Life Man
So, Do It Be Good*

(Berfikir, Bekerja dan Berdoa adalah upaya yang tidak akan pernah selesai.
Lakukan dengan benar akan menjadi satu kesucian dalam hidup seseorang.
Sehingga, kerjakan dengan baik)

Penulis

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian antara lain menganalisis perubahan kelembagaan industri pengrajin batik terkait aspek dinamika pendapatan, hubungan industrial, perluasan akses pasar berupa pasar input dan pasar output: menganalisis dampak perubahan kelembagaan kelangsungan usaha kerajinan batik tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan di dua kecamatan yang memiliki pengrajin batik terlama di Kabupaten Banyuwangi. Dua kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Cluring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data primer melalui observasi lapang, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan data *snowball sampling*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan ekonomi pengrajin batik Banyuwangi perkembangan industri dan perdagangan batik telah berperan dalam perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti pada pengrajin batik. Pendapatan pengrajin batik sebelum adanya kebijakan pemerintah dalam mendorong industri batik di Banyuwangi tidak terlalu tinggi peningkatannya sedangkan setelah kebijakan mengalami peningkatan. Perubahan hubungan kerja antara hubungan tenaga kerja bersifat kekeluargaan per tetangga tanpa melihat tingkat pendidikan. Untuk perluasan akses pasar output dilakukan dengan adanya kemudahan akses yang bisa memasarkan batik. Dampak perubahan kelembagaan kelangsungan usaha kerajinan batik antara lain dampak industri terhadap kehidupan sosial bagi pengusaha batik, dampak Industri terhadap mobilitas vertikal dan dampak pada kesejahteraan masyarakat Banyuwangi umumnya.

Kata kunci: perubahan kelembagaan, dinamika pendapatan , hubungan kerja , perluasan akses pasar berupa pasar input dan pasar output

ABSTRACT

The purpose of this research were to analyze the institutional changes batik industry-related aspects of the dynamics of the income, industrial relations, expansion of market access in the form of market input and output markets: analyzing the impact of changes in the institutional sustainability of the batik craft. This study will be conducted in two districts that have the highest batik craftsmen in Banyuwangi. Two of these districts and District includes the District Banyuwangi Cluring. The method used in this research were qualitative research methods to obtain primary data through field observation, interviews, and a Focus Group Discussion (FGD). Selection of informants in this study used snowball sampling method of data collection. Based on the results of the study showed that changes in economic institutions Banyuwangi batik batik industry and trade has been instrumental in the expansion of business opportunities and employment to improve the welfare of the family as the batik craftsmen. Revenue batik craftsmen before the government policy in encouraging the batik industry in Banyuwangi not exorbitant increase while after the policy has increased. Industrial change between labor relations are familial per neighbor regardless of education level. Expanding access to output markets is done with the ease of access to market batik. Impact of changes in the institutional business continuity among other batik industry impact on social life for batik entrepreneurs, the impact on the industry vertical mobility and impact on the welfare of society in general Banyuwangi.

Keywords: institutional changes, income, industrial relations, expansion of market access in the form of market input and output markets

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT serta hidayahNya, yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi S-2 (Magister Ilmu Ekonomi) Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Selain itu, dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Sebagai ungkapan bahagia, maka pada kesempatan ini penulis mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Adhitya Wardhono, S.E., M.Sc, Ph.D selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Regina Niken Wilantari, S.E, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
6. Teman – temanku angkatan 2013
7. Seluruh pihak yang membantu semangat dan dorongan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, maka disadari sepenuhnya tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat dan guna bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya.

04 Juni 2016

Penulis





DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan	12
2.1.2 Konsep Industri Kecil dan Menengah	17
2.1.3 Pendapatan	19
2.1.4 Konsep Hubungan Kerja	22
2.1.5 Aksesibilitas Pasar	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	35

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	35
3.3 Pemilihan Informan	37
3.4 Desain Penelitian	37
3.5 Metode Analisis Data	39
3.6 Definisi Variabel Operasional	41
3.7 Limitasi Penelitian	42
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Perkembangan Perekonomian di Kabupaten Banyuwangi	44
4.1.1 Deskripsi Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi	49
4.1.2 Deskripsi Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Banyuwangi	51
4.1.3 Perkembangan Industri Batik di Kabupaten Banyuwangi	53
4.1.4 Rentang Sejarah Industri Batik di Kabupaten Banyuwangi ...	62
4.2 Perubahan Kelembagaan Industri Batik Banyuwangi	67
4.2.1 Dampak Perubahan Kelembagaan Terhadap Dinamika Pendapatan Pengrajin Batik Banyuwangi	70
4.2.2 Perubahan terhadap Aksesibilitas Pasar	87
4.2.3 Perubahan kelembagaan terkait dengan hubungan Kerja	93
4.3 Pembahasan	
4.3.1 Dampak Perubahan Kelembagaan Industri Batik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	96
4.3.2 Perubahan Kelembagaan Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Masyarakat	98
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Budaya Indonesia yang diakui Dunia (UNESCO)	1
2.1 Resume Teori Aspek Aksesibilitas Pasar	24
2.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	28
4.1 Data Potensi Industri di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014	48
4.2 Jumlah Desa Kecamatan Cluring	50
4.3 Pertumbuhan Jumlah IKM Batik Banyuwangi	55
4.4 Jenis Produk dan Nilai Produksi	58
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengembangan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015	60
4.6 Banyaknya Upaya Promosi dan Pemasaran Batik	69
4.7 Pendapatan Pengrajin Batik di Kabupaten Banyuwangi Sebelum Kebijakan Pemerintah Tahun 2010 (juta rupiah)	74
4.8 Pendapatan Pengrajin Batik di Kabupaten Banyuwangi Setelah Kebijakan Pemerintah Tahun 2015 (juta rupiah)	78
4.9 Jumlah Produksi Batik Tahun 2009-2014	82
4.10 Biaya Produksi Pengrajin Batik	84
4.11 Perubahan Kelembagaan Ekonomi	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) Kabupaten Banyuwangi	3
1.2 Perkembangan IKM Batik Kabupaten Banyuwangi	4
1.3 Tingkat Pendapatan per Kapita Kabupaten Banyuwangi	7
2.1 Kerangka Konseptual	34
3.1 Desain Penelitian	38
3.2 Model Interaktif Analisis Data	40
4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Kabupaten Banyuwangi	45
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	50
4.3 Perkembangan Investasi Usaha di Kecamatan Banyuwangi	53
4.4 Pertumbuhan Jumlah IKM Batik	56
4.5 Persebaran IKM Batik per Kecamatan Kabupaten Banyuwangi	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Bupati

Lampiran 2 DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Lampiran 3 Transkrip Wawancara



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak kebudayaan hampir tersebar di semua aspek kehidupan, mulai dari adat –istiadat, pakaian adat, tarian, alat musik tradisional hingga bangunan arsitektural yang berupa rumah adat di tiap provinsi di Indonesia. Beberapa budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia melalui UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) di antaranya wayang, keris, dan batik (<http://budpar.go.id>). Hal ini merupakan bukti penghargaan bagi bangsa Indonesia atas jerih payah dalam melestarikan budaya milik bangsa dan memberikan hak paten atau hak cipta atas budaya tersebut.

Tabel 1.1 Budaya Indonesia yang diakui Dunia (UNESCO)

No.	Budaya	Nama Penetapan	Tahun
1.	Wayang	<i>Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity</i>	2003
2.	Keris	<i>Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity</i>	2005
3.	Batik	<i>Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity</i>	2009

Sumber: <http://budpar.go.id>, 2015.

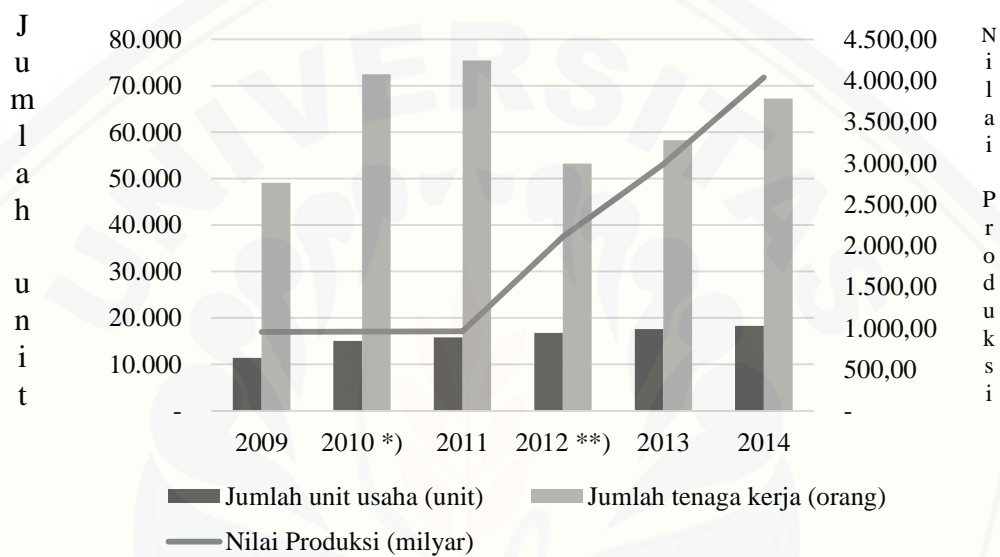
Pengakuan UNESCO tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional bahwa pada tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai hari Batik Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia di mata Internasional serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia. Selain itu upaya tersebut juga dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengembangan usaha batik Indonesia. Adanya perkembangan pasar bebas dunia pemerintah pun mencari cara untuk meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi pasar global. Pemerintah melalui Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan Departemen Perindustrian dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta didukung oleh

KADIN yang bertujuan untuk menempatkan produk Indonesia menjadi produk yang dapat diterima di pasar internasional dan berkarakter nasional. Upaya pemerintah lainnya dalam upaya merangsang pertumbuhan dan mempromosikan industri kreatif, pemerintah mengadakan program-program berskala besar seperti, pencanangan Tahun Indonesia Kreatif tahun 2009, Pekan Produk Kreatif 2009, pameran Ekonomi Kreatif.

Ekonomi kreatif sangat penting bagi Indonesia dan dunia karena perkembangannya yang pesat. Berdasarkan penelitian terbaru UNESCO dan UNDP (*United Nations Development Programme*) ekonomi kreatif juga berkontribusi penting terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan yang cukup signifikan dari sektor industri kreatif, tentunya menjadi pendorong yang menggembirakan bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan. Angka sementara pencapaian ekonomi kreatif 2013 (BPS, Statistik Ekonomi Kreatif 2013) menyatakan bahwa sektor ini pertumbuhannya mencapai 5,76%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,74%. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai 642 triliun atau 7% dari angka nasional. Sub-sektor ekonomi kreatif yang memberikan sumbangan terbesar adalah kuliner dan fashion dengan nilai masing-masing Rp 209 triliun (32,5%) dan 182 triliun (28,3%).

Bermula dari hal tersebut berarti peluang dan tantangan pelaku usaha industri Indonesia terbuka lebar untuk mengembangkan usahanya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hasil kajian empiris membuktikan pula bahwa Negara sedang berkembang mampu menjaga stabilitas perekonomiannya melalui kebijakannya sendiri dalam pengembangan usaha pada sektor industri (Bank Indonesia, 2012). Kondisi itu memberikan injeksi pendorong bagi seluruh pelaku industri khususnya pengrajin batik dalam mengembangkan usaha atau industrinya dalam pengolahan batik yang didukung dengan adanya peningkatan jumlah produksi batik. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh data perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi. Selain jumlah produksi IKM terus meningkat, jumlah unit usaha IKM juga mengalami peningkatan. Jumlah IKM dari tahun 2009 sejumlah 11.377 unit usaha

mengalami peningkatan hingga mencapai 18.320 unit di tahun 2014. Jumlah tenaga kerja IKM juga meningkat dari 49.132 orang pada tahun 2009 sampai 67.252 orang pada tahun 2014. Seiring perkembangan IKM tersebut memberikan dukungan kuat sehingga nilai produksi IKM meningkat pada tahun 2009 yakni sejumlah Rp. 956.25 Milyar dan terus meningkat hingga tahun 2014 sebesar Rp. 4035.84 Milyar (Disperindagtam Banyuwangi, 2015).



Gambar 1.1 Perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) Kabupaten Banyuwangi
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Banyuwangi, 2015.

Perkembangan IKM di atas memberikan dampak positif pada perkembangan seluruh usaha di Kabupaten Banyuwangi terutama usaha kerajinan batik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perkembangan usaha kerajinan batik yang terus meningkat. Walaupun peningkatan jumlah usaha batik di Kabupaten Banyuwangi tidak signifikan akan tetapi perkembangan tersebut sudah memberikan gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha kerajinan batik. Perkembangannya ditunjukkan pada data yang terdaftar mulai tahun 2009 usaha batik memiliki 15 unit usaha dan berkembang sampai 29 unit usaha pada tahun 2013. Jumlah tenaga kerja pun mengalami peningkatan yang mencapai angka 272 orang pada tahun 2013. Seiring perkembangan positif dari jumlah IKM batik dan

tenaga kerja pada industrinya, nilai penjualan IKM batik mampu menambah besaran produksi yang berjumlah Rp. 82.062 juta dengan volume produksi sebesar 410.308 potong batik (Disperindagtam Banyuwangi, 2015). Gambar 1.2 juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi bukan hanya membuka industri berdasarkan kemampuannya yang memiliki potensi dapat membantu perekonomian per kapita dan perekonomian daerah namun juga turut andil dalam upaya pelestarian budaya daerah. Oleh karena itu terdapat beberapa program Pemerintah Daerah yang menunjukkan dukungan untuk kegiatan industri kerajinan batik dimana sebenarnya industri ini termasuk dalam program ekonomi kreatif (www.banyuwangikab.go.id). Integrasi pemerintah dan masyarakat ini pun memberikan atmosfer kenyamanan bagi pengrajin batik di Kabupaten Banyuwangi untuk terus berproduksi dan menjaga kualitas outputnya. Meskipun sebenarnya masyarakat memiliki sistem produksi secara individual.



Gambar 1.2 Perkembangan IKM Batik Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Banyuwangi, 2015.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang telah dijelaskan di atas tentang penggunaan batik sebagai pakaian seragam kerja pada hari tertentu bagi pegawai negeri sipil juga memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha batik di Kabupaten Banyuwangi. Sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi juga

menerapkan hal tersebut bagi seluruh pegawai negeri sipil. Peraturan tentang penerapan pakaian batik juga diikuti oleh perusahaan swasta dan sekolah (Surat Edaran No. 065/041/429.013/2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2015 tentang Pakaian Dinas). Bila peraturan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi yang akan disesuaikan dengan berat dan intensitas pelanggaran sehingga peraturan dapat terus ditegakkan dan ditaati oleh seluruh elemen. Peraturan tersebut bukan hanya sebagai salah satu perwujudan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas Peraturan Presiden tetapi juga sebagai bentuk dukungan bagi usaha pengrajin batik.

Namun demikian bukan berarti perkembangan usaha pengrajin batik tidak mengalami masalah. Permasalahan pokok dalam pengembangan usaha pengrajin batik adalah fluktuasi harga bahan baku, sulitnya mencari tenaga pembatik, akses permodalan dan juga pemasaran. Yustika (2012) memaparkan bahwa teori biaya transaksi (*transaction costs*) merupakan perluasan dari pemikiran teori kelembagaan akibat kegagalan pasar dari pandangan neoklasik yang menyatakan bila pasar tidak memerlukan biaya karena pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna sehingga menimbulkan harga rendah. Sebaliknya pada realita asimetris informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual-beli menimbulkan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran.

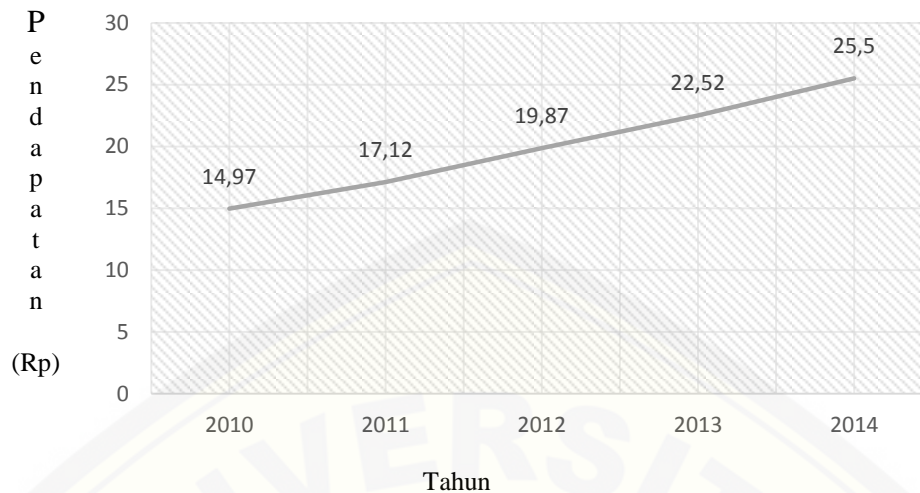
Setidaknya bila terdapat hubungan kerjasama diharapkan akan memberikan kemudahan pelaku usaha kerajinan batik dalam berinteraksi seperti dalam proses pengadaan bahan baku sampai pemasaran produk batik. Jika kerjasama yang telah dibangun akan dikuatkan oleh adanya naungan lembaga tertentu maka pelaku usaha akan memiliki batasan dan aturan main dalam berinteraksi antar pelaku usaha batik (Hubbard, 1997). Kelembagaan yang dimaksud dapat berupa organisasi, komunitas, koperasi, dan lain sebagainya. Selain memberikan kemudahan dalam proses produksi, kelembagaan yang dibangun akan memberikan wadah bagi pelaku usaha pengrajin batik dalam meminimalisir adanya hambatan atau kendala dalam produksi atau pun pemasaran (Londoño, 2006). Keuntungan tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen

karena dari pihak pelaku usaha batik juga memperoleh keuntungan karena dengan kepuasan konsumen tersebut akan menjaga kontinuitas hubungan pemasaran.

Kontinuitas industri kerajinan batik Kabupaten Banyuwangi memberikan kontribusi khusus bagi pendapatan pengrajin batik per kapita. Pasar batik Banyuwangi yang semakin meluas memberikan asupan dan injeksi semangat pengrajin untuk meningkatkan produktivitasnya dalam proses produksi sehingga permintaan produk batik dapat terpenuhi. Produk batik yang kini digemari oleh konsumen baik lokal maupun wisatawan asing juga menjadi salah satu faktor determinan produsen dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik melalui menghidupkan aset dan peningkatan pendapatannya (Verdiyani, Tanpa Tahun; Yustika, 2012).

Upaya tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi karena hal ini dianggap mampu memberikan angin segar bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan (www.banyuwangikab.go.id). Akan tetapi sepertinya hubungan simbiosis mutualisme dalam bekerja tersebut tidak dapat berjalan lancar dan semestinya karena penentuan tingkat upah tiap perusahaan/produsen tidak sama. Hal ini menimbulkan disparitas atau dinamika pada usaha kerajinan batik di Kabupaten Banyuwangi sehingga berdampak pada fluktuasi kontribusi batik untuk peningkatan pendapatan pengrajin batik.

Kemajuan industri kreatif dalam peningkatan kemajuan perekonomian pengrajin akan membawa keterkaitan terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Apabila kemajuan industri semakin bagus maka akan membuat pendapatan akan semakin meningkat jika ada aktivitas ekonomi yang semakin merubah kondisi masyarakat. Berdasarkan Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang stabil. Perkembangan dinamika pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi dimulai sebesar Rp. 14.970.000 pada tahun 2010 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2014 mencapai Rp. 25.500.000 (Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2015).



Gambar 1.3 Tingkat Pendapatan per Kapita Kabupaten Banyuwangi.
Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2015, diolah.

Permasalahan mendasar dalam usaha kerajinan batik di Kabupaten Banyuwangi diantaranya masalah integrasi mulai produksi sampai pemasaran melalui penerapan kelembagaan yang masif dari hulu sampai hilir (www.banyuwangikab.go.id). Keberadaan kelembagaan yang dipaparkan sedemikian rupa di atas diharapkan mampu memberikan stimulus pada industri kerajinan batik untuk menjadi inti ekonomi kreatif sebagai sumbangsih penggerak pendapatan pengrajin batik. Bila pendapatan pengrajin batik dapat bergerak positif maka angka kemiskinan pun dapat ditekan (Gakuru dan Mathenge, 2012). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak terjadi disparitas pendapatan karena adanya pemerataan.

Kendala lain yang perlu segera memperoleh solusi yaitu tentang aplikasi peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa tenaga kerja pada jenis industri apapun harus memperoleh fasilitas dan jaminan. Hak tenaga kerja menurut peraturan pemerintah di antaranya adalah jaminan perolehan upah dan jam kerja sesuai perjanjian serta jaminan kesehatan dan jaminan sosial (Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan). Penerimaan hak tenaga kerja tersebut akan memperkuat hubungan kerja antara pengrajin batik dan pemilik usaha atau pemilik modal. Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh perlindungan, jaminan, dan menerima imbalan berupa upah atau gaji sesuai kontrak perjanjian yang telah disepakati antara tenaga kerja dan pemilik usaha.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Fonny selaku Pengusaha Umah Batik Sayuwiwit Jalan Sayuwiwit Temenggungan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (23/02/2015) pada kenyataannya tenaga kerja khususnya pengrajin batik belum sepenuhnya memperoleh hak-hak tersebut. Penjelasan hasil wawancara dengan Ibu Fonny memberikan gambaran bahwa pengrajin batik dan pemilik usaha tidak memiliki kontrak perjanjian secara tertulis. Kontrak yang dibuat merupakan perjanjian secara lisan seperti akad hubungan kerja akibatnya kedua belah pihak tidak memiliki aturan terikat. Hanya pada saat pesanan atau penjualan melebihi target maka pihak Ibu Fonny akan memberikan bonus kepada tenaga kerjanya dan pada saat hari raya mereka juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Sisi lain dari tidak adanya perjanjian tertulis/akad kekeluargaan juga melemahkan pihak pengusaha dimana saat pesanan melonjak pengusaha tidak dapat menambah jam kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat, efektif dan efisien dengan tetap menjaga kualitas produknya. Hal tersebut berlangsung terus menerus sejak masih dikelola oleh pengelola sebelumnya (Bapak dari Ibu Fonny) sehingga sulit untuk merubahnya. Ketimpangan yang terjadi pada kasus antara peraturan yang dibuat dan kondisi lapangan pada industri pengrajin batik timbul karena adanya hubungan kerja yang memegang dasar kekeluargaan dalam kelembagaan industrinya. Oleh karena itu baik pemilik usaha ataupun tenaga kerjanya tidak punya kekuatan untuk saling mengikat. Pihak pengusaha merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak pengrajin batik sesuai dengan peraturan pemerintah dan pihak pengrajin batik juga merasa tidak memiliki kewajiban bekerja dengan baik dan merasa memiliki perusahaan sehingga dapat bersama-sama memajukan perusahaan.

Hubungan kerja industri kerajinan batik selain dengan atasan dan bawahan sebagaimana hubungan ketenagakerjaan maka hubungan kerja juga terjadi antara

semua pihak industri yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan dalam hal ini adalah hubungan antara supplier dan industri lain dalam satu industri batik. Hubungan insdustrial yang berjalan antara supliier dan pengrajin diwujudkan dalam kerjasama pemenuhan bahan baku seperti kain mori dan bahan baku lain yang dibeli dari *supplier*. Selain itu, hubungan dengan industri lain dilakukan untuk memasarkan kain batik supaya lebih laku dipasaran. Hal itu dipertegas dengan hasil wawancara dengan pemilik *Virde Batik Collection* Bapak H. Moch. Suyadi alamat Jl. Doktren Baitus Salam Simbar Tampo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Cluring juga mengatakan hal yang sama untuk bahan baku pembuatan batik masih membeli dari Solo dan Bali. Perusahaan *Virde Batik Collection* membeli bahan baku dalam jumlah banyak sebagai persediaan perusahaannya sendiri dan pasokan bahan kepada mitra kerjanya. Selanjutnya untuk output industri batik baik dari industri batik utama atau mitra industri akan dikirim ke Galeri *Virde Batik collection* untuk di jual. Hubungan kerja sama yang telah terjalin tidak memiliki perjanjian tertulis karena hanya menggunakan sistem kepercayaan. Demikian juga dengan tenaga kerja yang ada di perusahaan tidak ada perjanjian tertulis hanya akad yang dilakukan pada awal menjadi karyawan.

Bapak H. Moch. Suyadi juga mengatakan bahwa *Virde Batik Collection* menggunakan *Manajemen Qolbu* dimana pengrajin batik yang dapat menghasilkan batik dalam jumlah banyak maka akan dapat gaji/upah banyak. Demikian juga sebaliknya bila hanya dapat menghasilkan sedikit maka gaji/upah yang diperolehpun sedikit. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika *Virde Batik Collection* menerima pesanan melebihi batasan output, pada umumnya pihak pengusaha juga memberikan bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam industri pengrajin batik di Kabupaten Banyuwangi masih menggunakan sistem kekeluargaan sehingga tidak ada perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Paparan mengenai perkembangan pengrajin batik pada latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan kelembagaan industri pengrajin batik terkait aspek dinamika pendapatan, hubungan kerja, perluasan akses pasar berupa pasar input dan pasar output?;
2. Bagaimanakah dampak perubahan kelembagaan terhadap kelangsungan usaha kerajinan batik tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain:

1. Menganalisis perubahan kelembagaan industri pengrajin batik terkait aspek dinamika pendapatan, hubungan kerja, perluasan akses pasar berupa pasar input dan pasar output;
2. Menganalisis dampak perubahan kelembagaan kelangsungan usaha kerajinan batik tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai, terutama:

1. bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengetahuan terkait ilmu ekonomi kelembagaan di Kabupaten Banyuwangi dengan fenomena ekonomi kreatif yang sebenarnya;
2. bagi Institusi
Memberikan informasi sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan terutama mengenai pelaksanaan dan pemasaran usaha kerajinan batik Kabupaten Banyuwangi bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini; dan

3. bagi Lembaga Akademis

Menambah khazanah ilmu sebagai sarana pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat pada umumnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengkaji mengenai teori yang berkaitan dengan kelembagaan pada rumah tangga pengrajin batik yang ditelaah dalam konsep teoritis dan di bagi ke dalam tiga subbab. Pertama, yaitu landasan teori yang terdiri dari teori ekonomi kelembagaan, konsep hubungan kerja, dan teori pendapatan. Kedua, dijelaskan penelitian sebelumnya mengenai perubahan pola kelembagaan pengrajin batik. Ketiga, kerangka konseptual yang menjadi alur penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (*rule of the game*) berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang membentuk perekonomian yang efisien. Deliarnov (2006) menjelaskan bahwa kelembagaan sebagai aturan permainan sedangkan organisasi adalah wadah sebagai tempat bermain bagi sekumpulan orang. Setiap pemain mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana memenangkan permainan tetapi mempertimbangkan norma-norma dan aturan yang berlaku. Penyimpangan aturan main akan menyebabkan sistem berjalan tidak normal karena kelembagaan yang baik dapat menyelesaikan masalah koordinasi dan produksi. Sebab masalah koordinasi dan produksi terkait dengan motivasi para aktor, lingkungan dan kemampuan pemain dalam mengkondisikan lingkungan yang menghubungkan pilihan dengan hasil. Sementara itu North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai “*the rules of game*” memandang bahwa dalam pengambilan suatu bentuk norma sosial atau “*legal rule*” yang disebutnya sebagai “*external constrains*” dapat mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan hal terbaik yang dipilihnya secara optimal. Kelembagaan dapat pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota – anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun dimonitori oleh otoritas luar (*external authority*).

Pendapat lain menyatakan kelembagaan berisi serangkaian batasan-batasan atau perilaku dalam bentuk aturan dan regulasi; serangkaian prosedur untuk mendeteksi deviasi dari aturan dan regulasi sehingga didalamnya berisi serangkaian norma etika berperilaku dan moral sebagai pertimbangan pokok untuk melakukan interaksi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya (Anyonge *et al*, 2013). Meski sifatnya tidak linier namun cenderung menjadi kebutuhan individu anggotanya berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman (*safe*), kebutuhan hubungan sosial (*sosial affiliation*), pengakuan (*esteem*), dan pengembangan pengakuan (*self actualization*) (Elizabeth, 2003).

Berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah (Djogo, *et al*, 2003):

1. institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat;
2. norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur;
3. peraturan dan penegakan aturan/hukum;
4. aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota;
5. kode etik;
6. kontrak;
7. pasar;
8. hak milik (*property rights* atau *tenureship*);
9. organisasi;
10. insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Dari berbagai elemen di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan dapat memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Sebab ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati

aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang dapat hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.

Gambaran atas pengertian kelembagaan secara umum di atas merupakan dasar penjelasan awal dalam pengembangan teori kelembagaan. Parada (2001) menjelaskan bahwa sejarah *Original Institutional Economy/Old Institutional Economy* (OIE) bermula dari sejarah *German Historical School* (GHS) pada abad ke – 19 yang mengklaim bahwa setiap masyarakat harus menetapkan aturan sendiri. GHS mengkritik asumsi dasar ekonomi utama tentang perilaku rasional manusia dan mempertanyakan pretensi untuk menemukan hukum yang dapat dipakai secara umum dan kebijakan perdagangan bebas diberitakan oleh Inggris untuk seluruh Eropa. GHS juga menantang dasar pemikiran sekolah marginalis sehingga mengusulkan metodologi induktif bukan deduktif satu marginalis. Dasar-dasar metodologis dari OIE sebagian besar didasarkan pada pemikiran Dewey yang masih dapat berkembang tentang penyelidikan.

...Inquiry is the controlled or direct transformation of an indeterminate situation into one that is so determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the elements of the original situation into a unified whole.... (Dewey 1991, 108).

Catatan di atas menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan transformasi terkendali atau situasi langsung yang tak tentu menjadi salah satu penentu dalam perbedaan konstituen dan hubungan untuk mengubah unsur situasi sebenarnya menjadi suatu kesatuan yang utuh (Parada, 2002). Proses menilai masalah penelitian melibatkan tujuh langkah: 1) situasi tak tentu; 2) lembaga permasalahan atau mencari tahu apa masalahnya dan pengertian masalah; 3) penentuan masalah-solusi; 4) proses penalaran; 5) penalaran; 6) karakter operasional fakta-makna; 7) evaluasi akal sehat dan penyelidikan ilmiah. Oleh karena itu tidak ada hal seperti penyelidikan sesaat sebagai penghakiman (kesimpulan penyelidikan) yang diisolasi dari apa yang terjadi baik sebelum atau sesudah. Pembuktian tersebut menunjukkan relevansi metode induktif dalam teori OIE sehingga hasil penyelidikan menghasilkan daya penjelasan dan prediksi yang baik. Di samping itu OIE juga diketahui menggunakan metode historis kritis untuk melihat fakta

yang harus dijelaskan dan meneliti penjelasan alternatif. Selanjutnya memilih salah satu penjelasan alternatif dekat dengan fakta dan menarik implikasi untuk pikiran dan tindakan (Parada, 2001). Namun dalam penyelidikan berdasarkan OIE, perlu mencoba untuk menggunakan semua teknik dalam penelitian untuk menguji hipotesis daripada menjadi spekulatif atau tidak mampu menjelaskan model matematika dan ekonometrik karena adanya paradigma progresif.

Akibatnya evolusi dalam masyarakat akan menimbulkan kontradiksi antara seremonial atau perilaku yang berkaitan dengan uang, yang berlaku berdasarkan kelas rekreasi dan kekuatan-kekuatan sosial yang tertarik pada kegiatan industri. Veblen mendefinisikan kegiatan industri dengan semua upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan mengambil keuntungan dari lingkungan non-manusia (Hodgson, 1998). Veblen meluncurkan kritiknya terhadap orang hedonistik yang selalu menggunakan mikro modern dan teori makro untuk terus memaksimalkan utilitas untuk konsumen dan keuntungan bagi perusahaan sehingga perekonomian negara stabil. Dengan demikian memerlukan peran lembaga dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Namun pemikiran-pemikiran tentang teori OIE di atas dikembangkan oleh pemikiran baru yang menjelaskan bahwa kelembagaan juga memerlukan pengembangan melalui berbagai teori perilaku penetapan harga dalam pasar tidak sempurna (Williamson, 2000). Pemikiran baru dalam teori kelembagaan yang sering disebut dengan *New Institutional Economics* (NIE) menunjukkan bahwa kelembagaan memiliki porsi pada tiap kebutuhannya masing-masing. Lissowska (2006) menjelaskan bila perkembangan kelembagaan telah merubah beberapa posisi penting karena terdapat beberapa campur tangan seperti pemerintah, pihak pribadi dari anggota internal lembaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu timbul statis model yang memberikan gambaran hubungan transaksi individual dengan lingkungan lembaga publik. Pola kelembagaan memberikan gambaran pengembangan kelembagaan yang sudah semakin general sehingga banyak organisasi yang diakui oleh pemerintah. Kondisi tersebut memberikan kemudahan

pemerintah dalam mengontrol dan melakukan pengawasan melalui determinan usaha seperti faktor produksi dan lainnya.

Pada realitanya lembaga yang sekarang berkembang di pedesaan merupakan lembaga modern karena umumnya telah memiliki struktur dan tata nilai yang jelas; telah diformalkan (dengan terdapatnya kepastian anggota dan proses pelaksanaan); adanya aturan tertulis dalam anggaran dasar dan rumah tangga; adanya kepemimpinan yang resmi; dan biasanya sengaja dibentuk karena tumbuhnya kesadaran pentingnya keberadaan lembaga tersebut (Elizabeth, 2007). Perubahan kelembagaan merupakan sebuah proses yang terjadi secara terus menerus, sehingga perubahan kelembagaan disebut sebagai transformasi permanen (Yustika, 2012). Perubahan kelembagaan terjadi melalui dua cara, cara pertama dilakukan secara sukarela dan cara kedua dipaksakan oleh lembaga yang lebih kuat. Cara pertama umumnya didasari oleh kesepakatan kelompok/individu atas kesepakatan baru yang lebih menguntungkan. Namun pada cara kedua perubahan kelembagaan yang dirintis oleh pemerintah sebenarnya juga memiliki tujuan yang sama dengan cara pertama. Cara perubahan kelembagaan merupakan proses yang terjadi secara terus menerus sebagai akibat interaksi antar pelaku ekonomi untuk kepentingan tertentu.

Hira dan Hira (2000) juga menjelaskan bahwa proses perubahan kelembagaan dapat terjadi karena dua hal yaitu reaksi dari faktor ekonomi baru yang biasanya direfleksikan dengan adanya perubahan harga relatif dan selera. Kedua wirausahawan (dapat organisasi maupun individu) mengeksploitasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan perubahan yang inovatif. Selain itu terdapat dua faktor yang dapat dipetakan sebagai penyebab perubahan kelembagaan (*institutional change*) yakni permintaan dari pelaku dan penawaran dari lembaga yang memiliki otoritas spesifik. Kedua adalah pemerintah memiliki itikad untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja dalam bidang komoditas tertentu melalui penerapan harga tertentu guna melindungi penduduk yang ada di sektor tersebut (Hubbard, 1997).

2.1.2 Konsep Industri Kecil Menengah

Ada beberapa pengertian Industri kecil menengah (UKM) yang diberikan oleh beberapa lembaga, antara lain:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997

Usaha kecil menengah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar, dimiliki WNI dan berdiri sendiri. (*Baseline Economic Survey – BLS, Propinsi Jawa Barat*)

- b. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut (Haymans, 2005)

- 1) Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 juta.
- 2) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar
 - c) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
 - d) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

3) Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
- b) Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
- c) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

c. Berdasarkan Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia mengelompokkan UKM menjadi empat kelompok berdasarkan kekayaan bersih, total penjualan tahunan (omzet), tenaga kerja dan besarnya kredit yang diberikan dari bank kepada pelaku UKM dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Usaha yang memiliki penjualan tahunan (omzet) kurang dari Rp. 200.000.000/tahun
 - c) Usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang
 - d) Usaha yang memiliki pinjaman kredit dari bank kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000.000
- 2) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp. 200.000.000/tahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Usaha yang memiliki penjualan tahunan (omzet) lebih dari Rp. 200.000.000 /tahun
 - c) Usaha yang memiliki tenaga kerja 6 – 19 orang

- d) Usaha yang memiliki pinjaman kredit dari bank antara Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000
- 3) Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000/tahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Usaha yang memiliki penjualan tahunan (omzet) lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000.000/tahun
 - c) Usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 20 orang
 - d) Usaha yang memiliki pinjaman kredit dari bank lebih dari Rp. 5.000.000.000
- d. Berdasarkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah (RIP-IKM Tahun 2002 – 2004) didefinisikan sebagai berikut:

Industri Kecil tergolong dalam batasan Usaha Kecil menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka batasan Industri Kecil didefinisikan sebagai Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah-tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp.1 milyar atau kurang”.

2.1.3 Pendapatan

Ada banyak pengertian pendapatan menurut para ahli, pengertian pendapatan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011: 955) “*Gross inflow of economic benefits during the period arising in the ordinary activities of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants*”. Yang artinya adalah pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan memiliki banyak nama seperti *sales, fees, interest, dividends* dan *royalties*. Pendapatan adalah arus

masuk atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas central yang sedang berlangsung.

Pendapatan industri merupakan suatu hasil dalam bentuk upah atau gaji yang diperoleh dari bekerja. Mayoritas industri tidak mampu memperoleh pendapatan yang maksimal sehingga tidak sedikit dari mereka terpuruk dalam kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena intensitas tenaga kerja dikombinasikan dengan produktivitas marjinal yang rendah (Nuppenau, Tanpa Tahun). Kondisi tersebut menimbulkan pemikiran kemungkinan kombinasi produksi dengan menggunakan faktor produksi padat karya dengan tenaga kerja lainnya yang intensif operasi. Sistem padat karya yang luar biasa memungkinkan kelangsungan hidup produksi bahkan jika harga tenaga kerja meningkat.

Kemungkinan tersebut dapat digunakan pertimbangan untuk menemukan potensi yang menawarkan praktik usaha ramah lingkungan di mana persaingan dari industri menghasilkan lebih rendah. Akan tetapi situasi hal seperti ini harus disesuaikan dengan lingkungan industri ataupun usaha serta kondisi internal agar tidak memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan usaha dan lain sebagainya. Andaikan dalam kasus ini harga tenaga kerja (upah dan sewa) relatif independen dari bersaing komoditas sejak permintaan dan penawaran elastisitas yang rendah dan sebagai tambahan elastisitas pendapatan yang relatif tinggi (Lodhi, 1997). Namun pada dasarnya peningkatan pendapatan menjadi sangat penting bagi masyarakat pedesaan yang sangat menggantungkan keberlangsungan hidupnya dari satu mata pencaharian. Oleh sebab itu pengusaha harus mampu memutuskan penggunaan jasa tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utamanya yang tidak dapat diabaikan sehingga keuntungan usaha dapat terjaga.

Secara teoritis konsep inti teori Chayanov dalam menganalisis ekonomi keluarga adalah keseimbangan antara konsumen dan buruh dalam keluarga, yaitu ditunjukkan rasio antara jumlah yang mengkonsumsi (C) dan yang bekerja mendapat gaji (W) dalam keluarga tersebut (C/W). Jika jumlah tanggungan meningkat, maka rasio C/W akan meningkat pula. Untuk menurunkan rasio tersebut, berarti harus menambah jumlah jam atau hari kerja keluarga yang

bekerja, selain itu juga dapat menambah jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja (Chayanov, 1991). Penelitian ini mengajukan perempuan sebagai pekerja, supaya rasio C/W menurun berarti akan meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Teori ini memandang rumahtangga sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan produksi dan konsumsi, serta hubungannya dengan alokasi waktu dan pendapatan rumahtangga yang dianalisis secara simultan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa dalam mengkonsumsi, kepuasan rumahtangga bukan hanya ditentukan oleh barang dan jasa yang dapat diperoleh di pasar, tetapi juga dari berbagai komoditi yang dihasilkan dalam rumahtangga.

Jika pendapatan rumah tangga dapat mencapai stabilitas sesuai dengan produktivitasnya maka rumah tangga akan merasakan kepuasan dalam mencurahkan jam kerja dalam produksi usaha. Hal itu akan membuat tingkat konsumsi rumah tangga meningkat karena mereka mampu meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan barang – barang rumah tangga (Chayanov, 1991). Bila kepuasan tersebut terus meningkat, maka rumah tangga dapat dikatakan telah tercukupi kondisi sosialnya yaitu kesejahteraan. Dengan demikian rumah tangga dapat disebut sebagai rumah tangga yang mampu lepas dari kemiskinan melalui pendapatannya (Barnum dan Squire, 1979). Tingkat kemiskinan yang dapat ditekan juga akan memberikan dampak positif akan motivasi masyarakat melakukan migrasi. Sebab telah begitu banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya atau yang sering disebut dalam masyarakat miskin karena beberapa hal berikut:

1. ukuran angkatan kerja keluarga yang terus bertambah akibat pertambahan jumlah penduduk;
2. harga output usaha/produksi berfluktuatif karena meningkatnya produk substitusi dengan harga yang lebih rendah;
3. penggunaan teknologi dalam produksi menekan biaya produksi sehingga memaksa produsen mengurangi jasa tenaga kerja;
4. tingkat upah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2.1.4 Konsep Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang terjalin antara pekerja dan pengusaha setelah adanya perjanjian oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, sedangkan pengusaha juga menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrack, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjjajian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Oleh sebab itu hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja merupakan bentuk perjanjian kerja yang hakikatnya memuat hak dan kewajiban pihak yang bersangkutan. Hubungan kerja memiliki tiga unsur penting yakni:

1. Kerja, dimana dalam hubungan kerja harus terdapat pekerja tertentu sesuai perjanjian sehingga hubungan tersebut dapat disebut sebagai hubungan kerja;
2. Upah, dimana setiap hubungan kerja selalu timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara adil yang mana telah dijelaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah dan pekerja berhak upah dari pekerjaannya. Sebab itulah upah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja;
3. Perintah, merupakan salah satu hak pengusaha untuk diberikan pada pekerja dan pekerja pun harus melaksanakannya.

Hubungan industrial merupakan hubungan antara semua pihak (stakeholder) yang berkepentingan atas proses produksi, pelayanan jasa, operasional, serta segala kegiatan di suatu perusahaan. *Stakeholder* dalam sebuah perusahaan secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yakni *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal merupakan pihak yang memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab langsung dalam suatu perusahaan. Pihak internal perusahaan diantaranya adalah pemegang saham, manajer, karyawan. Sedangkan *stakeholder* eksternal merupakan pihak yang berada di luar lingkungan perusahaan dan memiliki sedikit banyak pengaruh terhadap suatu perusahaan. *Stakeholder* eksternal diantaranya adalah konsumen, pemerintah, masyarakat, pesaing, pemasok (supplier), serta Serikat Pekerja.

Unsur penting dalam hubungan kerja di atas hal penting lainnya adalah pengaturan hubungan kerja. Hubungan kerja diatur dalam suatu perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja sebenarnya dapat disampaikan secara tulis dan lisan, tetapi terdapat perjanjian kerja tertentu yang harus membuat secara tertulis, diantaranya perjanjian kerja laut (PKL) yang dibuat antara awak kapal dengan perusahaan atau dengan nahkoda sebagai wakilnya, perjanjian kerja antar kerja antar Negara (AKAN) yang dibuat antara perusahaan ekspor-impor tenaga kerja. Selanjutnya perjanjian kerja antar kerja antar daerah (AKAD) yang dibuat antara tenaga kerja dengan perusahaan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan yang memuat persyaratan dan kondisi dalam bekerja.

2.1.5 Aksesibilitas Pasar

Jarak antara masyarakat yang diperkirakan akan berkunjung sebaiknya juga tidak terlalu jauh dan untuk mencapainya tersedia cukup fasilitas transportasi atau aksesibilitas yang lancar. Beberapa hal yang menjadikan jarak yang jauh dirasakan menjadi lebih dekat yaitu adanya jalan dan alat transportasi, kemudahan untuk parkir, kelengkapan dan kualitas barang-barang yang dijual dan kemudahan untuk mencapai lokasi (tidak macet misalnya). Jumlah penduduk, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, aglomerasi dan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam penentuan lokasi suatu

kegiatan (Marsudi Djojodipuro, 1992). Suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak merupakan pasar yang perlu dipertimbangkan.

Duncan dan Hollander seperti dikutip Yusrinawati (2012), aksesibilitas pasar berupa fasilitas transportasi umum, kedekatan dengan konsumen potensial yang dapat berupa daerah perumahan dan perkantoran. Aksesibilitas eksternal mengatur sirkulasi eksternal yang efektif dan tidak menyebabkan gangguan sekitar, menyediakan luas area parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung sehingga area parkir tersebut mampu menjadi “generator” untuk memperkuat aksesibilitas pasar (Ekomadyo, 2012).

Tingkat aksesibilitas pasar juga bisa diukur berdasarkan pada beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan dan kualitas jalan (Bintarto, 1989) dalam Sidin (2006). Selain itu yang menentukan tinggi rendahnya tingkat akses adalah pola pengaturan tata guna lahan.

Keberagaman pola pengaturan fasilitas umum antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Seperti keberagaman pola pengaturan fasilitas umum terjadi akibat berpecahnya lokasi fasilitas umum secara geografis dan berbeda jenis dan intensitas kegiatannya. Kondisi ini membuat penyebaran lahan dalam suatu wilayah menjadi tidak merata (heterogen) dan faktor jarak bukan satu-satunya elemen yang menentukan tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas. (Miro, 2004 dalam Sidin, 2006)

Tabel 2.1. Resume Teori Aspek Aksesibilitas pasar

Aspek Aksesibilitas Pasar (sumber)			Keterangan
Bintarto (1989) dalam Sidin	Ekomadyo (2012)	Duncan dan Hollander dalam Yusrinawati (2012)	
a. Ketersediaan jaringan jalan b. Jumlah alat transportasi c. Panjang, lebar jalan d. Kualitas jalan	Ketersediaan area parkir	a. Fasilitas transportasi umum b. Kedekatan dengan konsumen	a. Ketersediaan jaringan jalan b. Jumlah alat transportasi c. Panjang, lebar jalan d. Kualitas jalan e. Ketersediaan area parkir f. Fasilitas transportasi umum g. Kedekatan dengan konsumen

Sumber : Yusrinawati (2012)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan referensi empiris yang digunakan sebagai acuan empiris dalam penulisan penelitian. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai pembandingan penerapan kelembagaan yang memiliki peran negatif dan positif. Pemahaman akan keuntungan dan manfaat kelembagaan untuk menaungi suatu usaha atau kegiatan tertentu seperti memiliki perbedaan yang mendasar. Hal tersebut timbul karena terdapat konsep pemikiran yang selalu diikuti dan dilakukan dari generasi ke generasi karena rasa nyaman yang sudah dirasakan dari dahulu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian usaha lebih menerapkan individual dalam produksinya. Padahal bila usaha dinaungi kelembagaan atau organisasi akan memberikan keuntungan lebih. Oleh karena itu terdapat beberapa perdebatan empiris yang memaparkan penerapan kelembagaan dalam usaha tertentu.

Wardani (2012) memaparkan bahwa teori perilaku produsen merupakan teori yang cocok digunakan untuk selalu memaksimalkan keuntungan walaupun hal tersebut kadang tidak berlaku pada saat banyak warga masyarakat yang menyelenggarakan hajatan. Sebab pada budaya dan adat-istiadat masyarakat masih memegang teguh rasa gotong royong sehingga bila ada bagian dari masyarakat memiliki hajatan maka masyarakat lainnya pun akan dengan tulus membantu sampai hajatan selesai. Dengan demikian masyarakat akan mengurangi kegiatan transaksi dan jual-beli sehingga produksi agak terhambat. Sejalan dengan paparan hasil penelitian tersebut maka sebaiknya dalam berproduksi produsen atau pelaku usaha harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lapang dan fakta. Sudantoko (2010) memaparkan bahwa pemahaman akan pola industri dan kemampuannya dalam berproduksi akan memberikan efisiensi dan efektifitas. Hasil empiris penelitiannya menunjukkan bahwa variabel bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, minyak tanah, dan kayu bakar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produksi batik skala kecil. Tingkat efisiensi teknis pelaku usaha batik skala kecil di daerah penelitian belum efisien dengan nilai rata-rata kurang dari satu (0,867).

Senada dengan penjelasan tersebut Furyana *et al.* (2013) mengutarakan hasil penelitiannya bahwa perusahaan atau produsen harus melakukan observasi lapangan. Hasilnya kondisi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan inovasi produk terdiri dari inovasi modulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat inovasi pada proses produksi. Inovasi kemasan yang dilakukan untuk memberikan sentuhan dan daya tarik pembeli dengan memberikan keindahan dan kerapihan pada bungkus produk. Inovasi desain pada produk sehingga akan menghasilkan produk yang heterogen agar pembeli akan memiliki banyak pilihan dan tidak merasa monoton. Inovasi ukuran yang disediakan pengusaha untuk memberikan diversifikasi harga produk sehingga seluruh elemen masyarakat dengan perbedaan pendapatan dapat menikmati produk perusahaan. Selanjutnya inovasi pengembangan bahan komplementer agar dapat memperoleh harga bahan dan kemudahan akses bahan dalam berproduksi serta inovasi pengurangan dalam produksi untuk menekan biaya transaksi sehingga produksi lebih efisien dan efektif.

Yohanes dan Indriyani (2013) mendukung pernyataan empiris tersebut karena peranan inovasi produk yang selama ini dilakukan oleh batik Ibu Haji Masudi masih belum cukup efektif dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan *refresh* produk bagi pembeli atau konsumen dalam pilihan produk. Dari sisi kesehatan dalam menjaga kontinuitas Oesman, *et al.* (2012) menggambarkan bahwa adanya keluhan pada otot-otot skeletal mulai dari tingkat tinggi, tingkat sedang dan tingkat rendah, mempengaruhi adanya keluhan muskuloskeletal khususnya ekstremitas atas tubuh pekerja yang juga berdampak pada timbulnya kebosanan kerja sehingga dapat mengurangi konsentrasi dan ketelitian pekerja pada saat membuat batik. Oleh karena itu, jaminan kesehatan dan manajemen jam kerja akan mengendalikan tingkat produktivitas tenaga kerja. Penjelasan hasil penelitian tersebut didukung hasil penelitian Widyaningrum (2009) dengan memberikan strategi pemasaran yang diperlukan. Strategi pemasaran diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan diantaranya dengan menggunakan cara kombinasi promosi antara metode *personal selling* dan *sales promotion*. Bila perusahaan berskala mikro dan kecil

maka disarankan menggunakan pilihan pemasaran dengan metode *personal selling* agar tidak menambah biaya transaksi. Sedangkan bila perusahaan berskala menengah dan besar dapat menggunakan kombinasi kedua metode tersebut atau hanya menggunakan satu metode yang dianggap lebih efektif yaitu *sales promotion*.

Dalam lingkup hubungan kerja yang lebih luas, Darmansyah dan Soebagyo (2010) juga menjelaskan bila bantuan informasi pasar akan menjaga stabilitas produksi. Apalagi bila perusahaan yang berskala menengah dan besar yang umumnya produksi sudah mencapai taraf ekspor. Bantuan informasi pasar dari negara domestik dan Negara importir serta kestabilan politik keduanya akan meningkatkan pencapaian ekspor. Bahkan bila kedua Negara mampu mengolah dan selalu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya ke arah ekspor maka perusahaan dapat mendorong pencapaian ekspor (*impulse faktor*). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hubungan kerjasama sebaiknya kedua belah pihak harus memberikan transparansi dan sikap kooperatif agar produksi dapat terus terjaga. Meskipun pada hakikatnya masih terdapat kendala dalam usaha produksi, produsen harus menjaga kontinuitas produksi. Fristia dan Navastara (2014) menjelaskan bahwa faktor penyebab belum berkembangnya ekspor usaha batik ialah rendahnya pada aspek teknis produksi batik. Kelemahan tersebut diantaranya yaitu kurangnya kemampuan teknis kegiatan produksi, kurangnya kemampuan pengrajin menjadi pengusaha batik, kurangnya interaksi kegiatan pembatik, serta kurangnya pengetahuan pengelolaan limbah dan aksesibilitas. Jika produsen dan pengrajin batik dapat bekerjasama dalam hubungan kerja untuk menekan kekurangan tersebut dengan meningkatkan kualitas produksi melalui pemenuhan faktor produksi dengan baik maka diestimasi kekurangan tersebut dapat terselesaikan.

Moersid (2013) menjelaskan pula bahwa produksi batik sebagai tradisi otentik selalu dapat dikonstruksi atau direkonstruksi, demi kepentingan politis ataupun pariwisata. Kapital ekonomi saja tidaklah cukup, berbagai upaya harus dilakukan untuk meraih kapital budaya dan secara terus menerus menambah pengetahuan budaya, kompetensi dan keunggulan. Hal tersebut membuktikan

bahwa produk domestik yang berbasis budaya masih dapat diolah untuk bersaing dalam kancah internasional. Berdasarkan analisis rantai nilai Novandari (2013) menjelaskan kompetensi inti yang dapat menjadi dasar bagi keunggulan bersaing UKM batik di Purbalingga adalah kemampuan para pengrajin dalam proses pembuatan batik tulis. Khususnya keluwesan pembatik pada tahap pencantingan yang tidak mudah untuk ditiru serta kecepatan pengrajin dalam melakukan proses pencantingan. Dengan demikian produk batik berbasis budaya lokal memiliki *bargaining position* dan *brandmark* khusus sehingga mampu menciptakan pasar sendiri.

Bila dibandingkan dengan paparan empiris di atas yang memberikan gambaran pro kontra dalam pelaksanaan industri kerajinan batik, pada dasarnya penelitian ini dan penelitian sebelumnya ditulis guna mengetahui kondisi industri batik. Kondisi yang dimaksud meliputi pendapatan industri, pendapatan tenaga kerja, pola hubungan kerja, dan lain sebagainya. Akan tetapi penulisan penelitian ini memiliki perbedaan khusus dalam menggambarkan kondisi industri kerajinan batik yaitu melalui gambaran perubahan kelembagaan yang diterapkan industri batik. Selain itu melalui gambaran dinamika pendapatan industri dan pola hubungan kerja yang tercipta atas hubungan tenaga kerja pengrajin batik. Lebih jauh lagi, penelitian ini memberikan gambaran objek lokasi penelitian baru dengan menyesuaikan produktivitas dan akses pasar yang telah dimiliki industri kerajinan batik yakni di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Widyaningrum (2009)	Strategi Pemasaran Kampung Batik Laweyan Solo	Strategi pemasaran yang diperlukan adalah menggunakan cara kombinasi promosi antara metode <i>personal selling</i> dan <i>sales promotion</i> .
2.	Darmansyah dan Soebagyo (2010)	Stimulus Ekspor Terhadap Kinerja Perusahaan-Perusahaan Batik	Bantuan informasi pasar dari negara domestik dan importir serta kestabilan politik keduanya akan meningkatkan pencapaian ekspor dan selalu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya ke arah ekspor dapat mendorong pencapaian ekspor (<i>impulse faktor</i>).

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
3.	Sudantoko (2010)	Pemberdayaan Industri Batik Skala Kecil Di Jawa Tengah (Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Pekalongan)	Variabel bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, minyak tanah, dan kayu bakar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produksi batik skala kecil. Tingkat efisiensi teknis pelaku usaha batik skala kecil di daerah penelitian belum efisien dengan nilai rata-rata kurang dari satu (0,867).
4.	Oesman, et al. (2012)	Analisis sikap dan posisi kerja pada perajin batik tulis di rumah Batik nakula sadewa, sleman	Kesimpulannya adalah adanya keluhan pada otot-otot skeletal mulai dari tingkat tinggi, tingkat sedang dan tingkat rendah, mempengaruhi adanya keluhan muskuloskeletal khususnya ekstremitas atas tubuh pekerja yang juga berdampak pada timbulnya kebosanan kerja sehingga dapat mengurangi konsentrasi dan ketelitian pekerja pada saat membatik.
5.	Wardani (2012)	Produktivitas UMKM Batik Sragen Berbasis Nilai Lokal	Teori perilaku produsen yang selalu memaksimalkan keuntungan tidak berlaku pada saat banyak warga masyarakat yang menyelenggarakan hajatan.
6.	Yohanes dan Indriyani (2013)	Peranan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran Batik Tanjung Bumi Ibu Haji Masudi	Peranan inovasi produk yang selama ini dilakukan oleh batik Ibu Haji Masudi masih belum cukup efektif dalam meningkatkan kinerja pemasaran.
7.	Furyana et al. (2013)	Inovasi Produk Batik Pesisiran Pada Perusahaan Batik Virdes Di Banyuwangi	Teori yang cocok dengan kondisi lapangan bahwa perusahaan melakukan inovasi produk terdiri dari inovasi modulasi, inovasi kemasan, inovasi desain, inovasi ukuran, inovasi pengembangan bahan komplementer serta inovasi pengurangan.
8.	Moersid (2013)	Re-invensi batik dan Identitas indonesia dalam arena pasar global	Batik sebagai tradisi 'otentik' selalu dapat dikonstruksi atau direkonstruksi, demi kepentingan politis ataupun pariwisata. Kapital ekonomi saja tidaklah cukup, berbagai upaya harus dilakukan untuk meraih kapital budaya dan secara terus menerus menambah pengetahuan budaya, kompetensi dan keunggulan.

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
9.	Novandari (2013)	Pemetaan dan Analisis Kompetensi Inti UKM Batik di Kabupaten Purbalingga dengan Pendekatan <i>Value Chain</i>	Berdasarkan analisis rantai nilai, kompetensi inti yang dapat menjadi dasar bagi keunggulan bersaing UKM batik di Purbalingga adalah kemampuan para pengrajin dalam proses pembuatan batik tulis khususnya keluwesan pembatik pada tahap pencantingan yang tidak mudah untuk ditiru serta kecepatan pengrajin dalam melakukan proses pencantingan.
10.	Fristia dan Navastara (2014)	Faktor Penyebab Belum Berkembangnya Industri Kecil Batik Desa Kenongo Kecamatan Tulangan-Sidoarjo	Faktor penyebab belum berkembang ialah kurangnya kemampuan teknis kegiatan produksi, kurangnya kemampuan pengrajin menjadi pengusaha batik, kurangnya interaksi kegiatan pembatik, serta kurangnya pengetahuan pengelolaan limbah dan aksesibilitas.

Sumber: berbagai literatur terkait, diolah.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka pikir yang digunakan sebagai acuan alur pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Dengan demikian pembahasan akan tetap pada batasan yang sesuai dengan penelitiannya. Perkembangan usaha kerajinan batik pada dasarnya tergantung pada tenaga ahli pengrajin batik yang memiliki kemampuan untuk membuat kain batik dengan kualitas tertentu sehingga usaha batik memiliki ciri khas masing-masing. Oleh sebab itu seiring berkembangnya zaman kerajinan batik banyak diminati oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya sebagai balutan busana atau *fashion* dalam acara formal tetapi juga kegiatan sehari-hari. Namun tingginya permintaan belum dapat dijadikan tolok ukur untuk menjaga stabilitas usaha dan mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pengrajin batik atas keberhasilan pola kelembagaan pengrajin batik.

Kesejahteraan pengrajin batik atas keberhasilan pola kelembagaan pengrajin batik tidak terlepas dari keberhasilan pengembangan usaha pengrajin batik yang dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam atau diri sendiri pengusaha dan pengrajin batik dalam mengembangkan usahanya dengan menjalin hubungan kerja. Akan tetapi kenyamanan yang telah dirasakan pengrajin batik secara individual menghambat keinginan untuk bekerja sama dengan pengrajin lain . Hal tersebut dipicu dari pandangan atau persepsi terbatas bahwa pengrajin batik tidak ingin pelanggannya kecewa bila menggunakan batik produksi pengrajin lain. Terlebih lagi pengrajin batik sudah memiliki kekuatan pada pasar maksudnya pengrajin sudah memiliki pelanggan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku sampai pemasaran. Artinya bila pengrajin batik menjalin hubungan kerjasama dalam naungan kelembagaan yang memberikan aturan dalam pelaksanaan produksi dan atau pemasaran maka pengrajin batik merasa kekuatan pasar yang telah dimiliki akan melemah. Ancaman kerugian tersebut membuat ketakutan tersendiri sehingga pengrajin batik lebih memilih untuk tetap bertahan pada zona amannya;
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari lingkungan pengrajin batik yang tidak disengaja atau diatur oleh pengrajin. Sebagai contoh adalah adanya persaingan pasar tidak sempurna pada industri pengrajin batik sehingga menimbulkan harga yang variatif. Timbulnya pasar persaingan tidak sempurna akibat dari adanya ketimpangan pengetahuan dan pola pemasaran pengrajin batik. Oleh karena itu beberapa pengrajin batik yang memiliki modal dan kekuatan *link* tersebut yang mampu menguasai pasar. Selain itu aturan kerja yang sudah dibangun tiap pengrajin dengan *partner* atau koleganya membuat pengrajin merasa terikat sehingga tidak leluasa untuk membangun hubungan kerja sendiri dan hubungan kerja yang baru;
3. Faktor pemasaran merupakan faktor yang mempengaruhi pengrajin batik dalam menjangkau akses pasar untuk memasarkan produk batiknya masing-masing. Pola pemasaran dan pemilihan pasar akan menentukan seberapa banyak produk batik yang akan terjual. Salah satu indikator yang mempengaruhi dalam faktor pemasaran adalah informasi yang harus diperoleh pengrajin secara lengkap dan cepat. Hal tersebut akan memberikan banyak

keuntungan karena akan memberikan gambaran bagaimana pengrajin harus berperilaku. Di samping itu informasi kondisi pasar dan cara pemasaran akan membantu pengrajin batik untuk mempersiapkan kondisi terburuk untuk menekan kerugian. Bahkan fluktuasi harga jual batik menjadi salah satu faktor pengrajin batik untuk berupaya lebih agar mampu menjaga eksistensinya.

Bila pengrajin mampu mempelajari faktor-faktor di atas maka pengrajin batik akan mampu mengendalikan hubungan kerja (kelembagaan) antar pengrajin batik atau pun kolega lainnya. Pemahaman faktor tersebut akan menjadi pandangan dalam pengambilan keputusan berproduksi sekaligus menjadi *warning* bagi pengrajin sehingga Dengan demikian akan tercipta perubahan kelembagaan yang lebih menguntungkan karena terdapat pondasi kerjasama yang terintegrasi dengan konsepsi *win-win solution* sehingga menghasilkan beberapa perubahan, di antaranya:

1. adanya perubahan kepemilikan usaha, hal ini menggambarkan pergeseran atau perubahan pola hubungan kerjasama karena terdapat perubahan struktural atau perubahan hubungan dari status pegawai dengan pemilik usaha atau modal ke status *partner*;
2. perubahan keahlian teknik kerajinan batik dimana pengrajin batik yang masih sebagai pegawai memiliki kemampuan dan keahlian lebih dan didukung kondisi ekonomi yang kuat sehingga pengrajin batik yang bekerja pada salah satu industri rumah tangga batik mampu mendirikan atau membuka usaha industri batik baru;
3. perkembangan perubahan pola hubungan kerja sama antar pengrajin batik, sesuai dengan penjelasan pada poin sebelumnya perubahan pola kelembagaan pada pengrajin batik menimbulkan pola hubungan kerja yang terjalin secara profesional sehingga walaupun beberapa *partner* dalam dunia industri merupakan pegawainya pada periode sebelumnya. Akan tetapi karena kondisi tertentu hubungan kerja dari pegawai dan pemilik menjadi hubungan antar pemilik atau pelaku usaha dengan kedudukan yang sejajar.

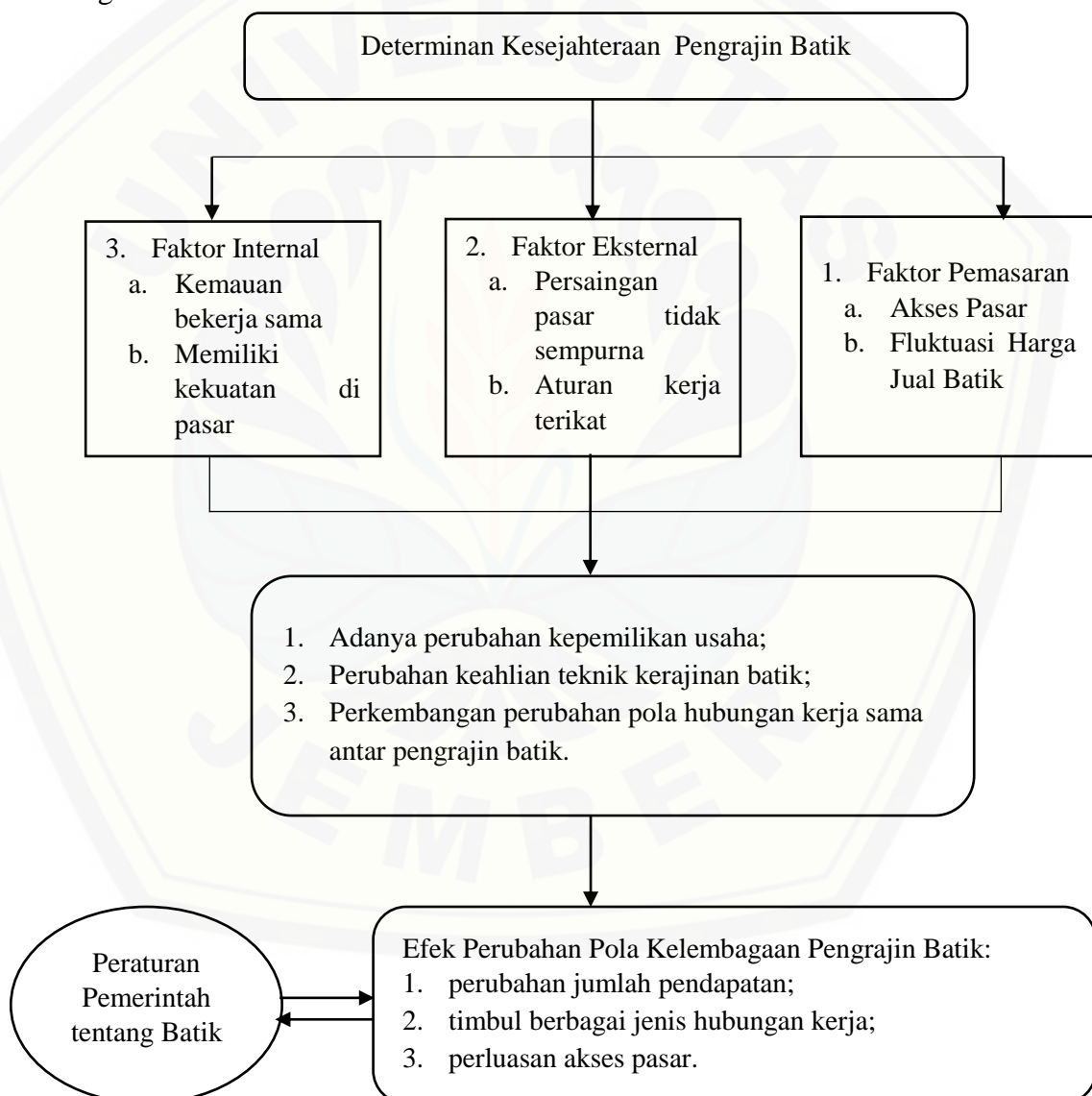
Perubahan pola kelembagaan dalam hubungan kerjasama antar pengrajin batik tersebut memberikan perubahan cara pandang dan pola perilaku pengrajin

batik dalam produksi. Namun sebenarnya perubahan tersebut memberikan dampak positif sehingga banyak *stakeholder* mendukungnya. Bahkan pemerintah juga memiliki andil dalam memberikan dukungan untuk membantu perkembangan industri batik melalui peraturan pemerintah seperti pengakuan budaya batik dari Indonesia oleh UNESCO. Perubahan pola kelembagaan dan dukungan pemerintah memberikan dampak positif bagi pengrajin batik di Kabupaten Banyuwangi:

1. perubahan jumlah pendapatan, merupakan salah satu bukti keuntungan dengan adanya pola hubungan kerja dalam naungan kelembagaan yang lebih menekankan dengan aturan main yang harus diikuti sehingga pelaksanaan produksi antar pengrajin batik dapat lebih tertata, efisien, dan efektif. Oleh karena itu produktivitas pengrajin batik dapat diapresiasi lebih tinggi karena kualitas produk dapat terjaga;
2. timbul berbagai jenis hubungan kerja, maksudnya timbul variasi hubungan kerja yang akan memudahkan dalam bekerjasama seperti administrasi, legalitas dengan penggunaan payung hukum, hubungan sosial, dan lain sebagainya;
3. perluasan akses pasar baik pasar input dan pasar output, bila pengrajin batik dapat memahami tujuan perubahan kelembagaan dalam industri pengrajin batik maka tidaklah sulit untuk membuka diri untuk menunjukkan kekuatan industri dengan menguatkan usaha secara internal. Penguatan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan produksi dan memberikan kualitas produk dengan standar tertentu. Pada aras lain menunjukkan bahwa semakin kuat suatu industri untuk memiliki wewenang dalam perkembangan pasar industri batik maka industrinya akan memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga mempengaruhi proses pemasaran.

Peraturan yang dibuat pemerintah pun memberikan pengaruh terhadap pemerintah sendiri karena dalam peraturannya pemerintah menekankan bahwa seluruh pegawai negeri sipil harus menggunakan pakaian seragam batik pada hari tertentu sebagai contoh pada pegawai negeri sipil di daerah Kabupaten Banyuwangi, pegawai wajib menggunakan batik pada hari Rabu dan Kamis,

untuk sekolah setiap hari tertentu dalam satu minggu juga menggunakan seragam batik, demikian juga halnya dengan karyawan swasta. Oleh karena itu antara pengrajin dan pemerintah telah menjalin hubungan kerjasama secara baik sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Selain itu dampak yang timbul atas perubahan kelembagaan pengrajin tersebut juga berlanjut pada kondisi sosial-ekonominya sehingga mengalami perubahan pada dinamika pendapatan; kelembagaan yang lebih teratur; dan terbentuknya hubungan kerja yang terintegratif.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab 3 ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan *setting* dari penelitian ini mulai dari lokasi dan waktu penelitian, pengumpulan data, penentuan Informan, desain penelitian, metode penelitian, dan limitasi penelitian dalam menjawab dua pertanyaan empiris yang telah dijelaskan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data primer melalui observasi lapang, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua kecamatan yang memiliki pengrajin batik terbanyak di Kabupaten Banyuwangi. Dua kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Cluring. Pemilihan lokasi penelitian di dua Kecamatan tersebut berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. Data dari dinas terkait menunjukkan bahwa pengrajin batik terbanyak dan memiliki pasar yang lebih luas dari pada wilayah lainnya berada di dua Kecamatan tersebut dengan nama usaha pengrajin batik unggulan diantaranya Umah Batik Sayuwit dan UD. *Virides Batik Collection* dengan produk batik diantaranya batik tulis, batik semi tulis, batik cap/sablon dan printing. Semua jenis batik tersebut selalu menonjolkan ciri khas batik Banyuwangi yaitu gajah oling. Adapun jenis motif batik Banyuwangi antara lain Gajah Oling, Kangkung Setingkes, Blarakan, gedeghan dan lain sebagainya. Penelitian tentang industri pengrajin batik Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tahun 2015.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dasar penelitian dengan metode analisis kualitatif. Berikut merupakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu (Hendri, 2009):

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caranya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan Informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan Informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Agusta, 2005).

2. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Suryana, 2010). Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

- a. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian Informan.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- c. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

3.3 Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan data *snowball sampling* yaitu proses pengambilan data pada informan utama yang telah ditentukan. Informan utama dalam penelitian ini merupakan informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang keberadaan industri pengrajin batik di Kabupaten Banyuwangi. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah dua orang, yang terdiri dari pemilik industri pengrajin batik Sayuwit dan pemilik industri pengrajin batik di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pengambilan data diteruskan pada informan berikutnya berdasarkan informasi yang diberikan dari informan sebelumnya. Dalam hal ini, jumlah informan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

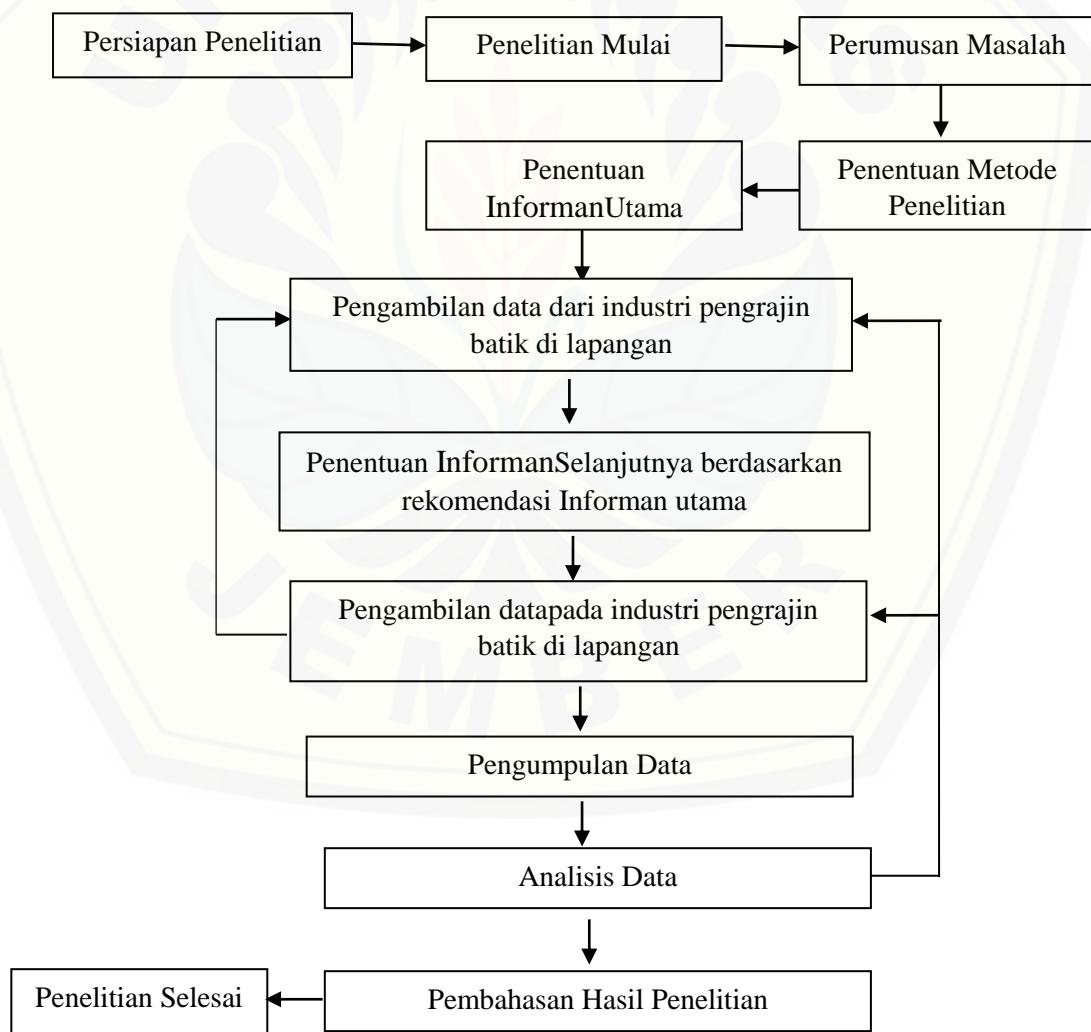
3.4 Desain Penelitian

Desain atau alur pelaksanaan penelitian meliputi persiapan peneliti, pengambilan data di lapangan, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Persiapan penelitian dilakukan untuk menghitung jumlah informan pada industri pengrajin batik di Kabupaten Banyuwangi sesuai wilayah per kecamatan. Tiap kecamatan yang telah teridentifikasi terdapat industri pengrajin batik akan hanya akan diambil sampel sesuai rekomendasi informan utama.

Data diperoleh melalui wawancara terhadap informan utama yakni ketua pengrajin batik dan atau pemilik industri pengrajin batik Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya wawancara akan diteruskan ke beberapa informan lain sesuai

rekomendasi yang diberikan oleh informan kunci sesuai kebutuhan penelitian. Selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi dan notulen pada proses pengambilan data pada industri pengrajin batik. Sebagai pendukung data primer, digunakan pula data sekunder yang diperoleh dari data instansi terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. Data yang diperoleh akan dikumpulkan ke dalam kategori tertentu sebagai pola dasar untuk dianalisis sehingga dapat dirumuskan tema dan hipotesis sesuai kebutuhan penelitian. Analisis data tersebut akan diuraikan dalam pembahasan rumusan masalah secara deskriptif.

Tahapan pelaksanaan penelitian seperti desain berikut:



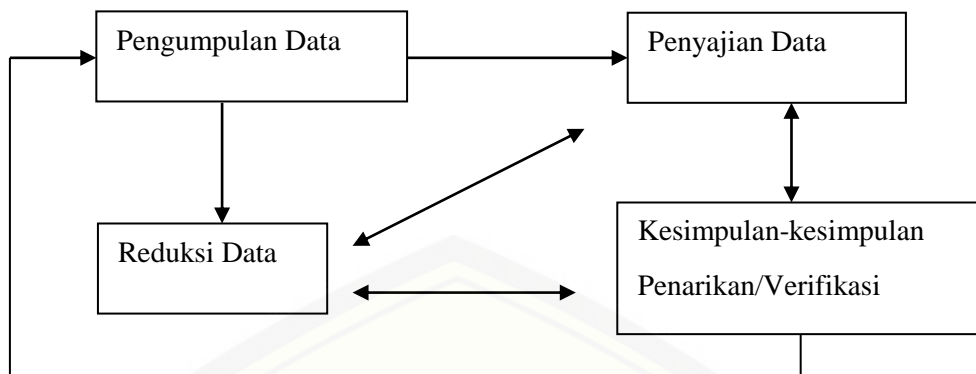
Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Penelitian kualitatif juga merupakan pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana (Musianto, 2002). Selain itu pendekatan kualitatif juga suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan Informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Suryana, 2010).

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teori. Kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data, menata dan menemukan apa yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian yaitu perubahan kelembagaan ekonomi industri pengrajin batik, dinamika pendapatan, hubungan kerja dan aksesibilitas pasar di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Selanjutnya hasil analisis data dilaporkan secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interactive Model Analysis* dari Miles dan Huberman seperti yang digambarkan pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Model Interaktif Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Gambar 3.2 menunjukkan analisis kualitatif dengan pendekatan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data. Proses dalam analisis ini bersifat siklus bukan linear sehingga dalam kegiatan pengumpulan data tidak dapat dipisahkan dari analisis data. Disamping itu analisis data juga dapat dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Model interaktif ini dibagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian/data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan atau uraian yang diperoleh dari penelitian ditelaah kembali keseluruhan data yang dikumpulkan (baik melalui wawancara, observasi maupun studi dokumen) sehingga akan ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan peneliti.

2. Tahap Penyajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data disusun dengan menyampaikan informasi berdasarkan data yang disusun secara runtut dan baik sehingga memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Oleh karena itu dalam setiap penelitian, peneliti akan membuat matriks, grafik dan *network*.

3. Tahap menarik kesimpulan/verifikasi

Tahapan menarik kesimpulan/verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Proses dilakukan sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Selain itu peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan perasaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif. Harapannya dengan penambahan data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Artinya setiap kesimpulan sebaiknya terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

3.6 Definisi Variabel Operasional

Definisi variabel operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pengrajin Batik merupakan rumah tangga yang melakukan pengolahan industri kerajinan batik baik dalam skala industri kecil menengah baik sebagai ketua pengrajin batik, pemilik industri, pengrajin batik (sebagai karyawan) yang mengolah dari bahan mentah sampai batik jadi siap jual. Pengrajin batik yang dimaksud merupakan pengrajin batik yang melakukan produksi atau pengolahan kerajinan batik di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Cluring.
2. Perubahan Kelembagaan merupakan perubahan aturan main (*rules of the game*) yang terdapat pada pengrajin batik karena perubahan pola hubungan kerja. Perubahan kelembagaan akan menyebabkan perubahan pendapatan yang diterima oleh pengrajin batik baik yang disebabkan oleh semakin tingginya produktivitas ataupun karena harga komoditas baru yang lebih tinggi. Perubahan kelembagaan yang dimaksud adalah perubahan aturan main yang menjadi acuan dalam pelaksanaan usaha atau industri pengrajin batik. Aturan atau norma tersebut dapat berupa bentuk tertulis seperti kontrak kerjasama, kontrak kerja atau aturan kelompok yang ditulis dan menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama. Selain itu, aturan atau norma juga dapat berupa aturan tidak tertulis yang di jalankan dan dipatuhi oleh pengrajin batik. Perubahan kelembagaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah aspek dinamika

pendapatan biaya produksi, hubungan kerja, perluasan akses pasar berupa pasar input dan pasar output.

3. Dinamika pendapatan merupakan perubahan pendapatan yang diterima oleh pengrajin batik dari tiap satu minggu sekali atau setelah penyelesaian pemesanan batik berdasarkan perjanjian. Perubahan pendapatan dapat disebabkan karena masuknya teknik baru dalam produksi kerajinan batik sehingga mengurangi penggunaan faktor produksi padat karya dan penerimaannya. Selain itu perubahan pendapatan dapat disebabkan persaingan dalam pasar yang kurang sehat. Disamping itu penambahan sumber pendapatan pengrajin batik melalui diversifikasi usaha mampu menambah pendapatannya.
4. Hubungan kerja merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aturan main pengrajin batik dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Bentuk kerjasama tersebut terbentuk antar industri pengrajin batik, penyedia bahan baku dengan pengrajin batik, pemilik industri dengan karyawan yang bekerja, pemilik modal, antar pengrajin batik dan pembeli.

Obyek pada penelitian ini adalah industri pengrajin batik yang terdapat di dua kecamatan tersebut. Industri pengrajin batik merupakan usaha pengolahan kain batik yang dikelola oleh pribadi/perorangan dan berkelompok dalam bentuk industri kecil menengah. Komoditas yang diproduksi oleh Umah Batik Sayuwit dan juga Batik Virides Collection memiliki variasi batik yang sering dikenal batik unggulan diantaranya gajah oling, kangkung setingkes, paras gempal, gedhekan dan masih banyak lagi motifnya.

Fokus penelitian ini adalah perubahan kelembagaan (perubahan aturan main/*rules of the game*) pengrajin batik karena perubahan hubungan kerja. Perubahan pola hubungan kerja dalam kelembagaan memberikan pengaruh dalam perilaku sosial ekonomi akibatnya integrasi antar pengrajin batik menurun. Perubahan kelembagaan menyebabkan perubahan pendapatan pengrajin batik baik yang disebabkan oleh semakin tingginya produktivitas ataupun karena harga komoditas baru yang lebih tinggi.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- c. Perubahan kelembagaan ekonomi pengrajin batik Banyuwangi perkembangan industri dan perdagangan batik telah berperan dalam perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti pada pengrajin batik. Perubahan kelembagaan dijelaskan sebagai berikut
 - 1) Pendapatan pengrajin batik sebelum adanya kebijakan pemerintah dalam mendorong industri batik di Banyuwangi tidak terlalu tinggi peningkatannya sedangkan setelah kebijakan mengalami peningkatan. Perubahan hasil produksi menunjukkan hasil Produksi mengalami peningkatan signifikan dan biaya produksi semakin mahal karena pasar input yang semakin tinggi.
 - 2) Perubahan kelembagaan terhadap hubungan tenaga kerja bersifat kekeluargaan per tetangga tanpa melihat tingkat pendidikan. Perekrutan tenaga kerja masih bersifat kekeluargaan dan kemitraan untuk tenaga kerja lama tetapi perekrutan tenaga kerja yang baru sudah memperhatikan tingkat pendidikan. Sudah ada pembagian tugas antar tenaga kerja sehingga mempunyai tanggung jawab sendiri.
 - 3) Perubahan kelembagaan ekonomi terhadap aksesibilitas pasar dijelaskan pengusaha sudah tidak menawarkan sendiri tetapi lewat galeri dan pemasaran online telah dilakukan oleh pengrajin.
- d. Dampak perubahan kelembagaan kelangsungan usaha kerajinan batik antara lain dampak industri terhadap kehidupan sosial bagi pengusaha batik, dampak Industri terhadap mobilitas vertikal interaksi simbolis yang memunculkan peningkatan status sosial dan kesenjangan pendapatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka dapat diajukan beberapa saran antara lain:

- a. Pemerintah hendaknya mampu memberikan fasilitas internet dengan hot spot yang bermanfaat untuk pemasaran on line di tempat-tempat komunitas pengrajin untuk membantu pemasaran IKM batik. Selain itu, hak paten motif sebagai kreasi asli para pengrajin hendaknya ditangani lebih optimal sehingga adanya hak paten tersebut akan menambah nilai jual batik Banyuwangi baik nasional maupun internasional.
- b. Bagi asosiasi pengusaha batik hendaknya meningkatkan pendapatan, hubungan kerja dan aksesibilitas pasar yang lebih baik antara lain:
 1. Untuk meningkatkan pendapatan, produksi batik juga harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kemampuan kreatifitas dalam desain batik dan memperbaiki pengelolaan usaha atau manajemen yang selama ini masih tradisional. Adanya pelaksanaan manajemen yang lebih optimal akan membuat para pengrajin batik lebih baik.
 2. Meningkatkan pasar input dengan menjalin kerja sama dengan mitra dan supplier bahan baku untuk mengatasi keterbatasan bahan baku
 3. Meningkatkan pasar output dengan cara memasarkan produk batik dengan media online supaya lebih meningkatkan sasaran pasar output.
 4. Meningkatkan hubungan dengan bawahan dengan memberikan kelayakan imbalan dalam industri serta mengurangi turn over dengan kesejahteraan bawahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2005. Metode Kualitatif. Disampaikan pada Lokakarya Metode Kualitatif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Selasa, 11 Oktober 2005.
- Anyonge, Tom *et al.* 2013. An Analysis of Lessons Learnt from Field Application of IFAD's Sourcebook on Institutional and Organizational Analysis for Pro-Poor Change. International Fund for Agricultural Development (IFAD).
- Barnum, Howard N. dan Squire, Lyn. 1979. An Econometric Application of The Theory of The Farm-Household. Journal of Development Economics 6 (1979) 79-102. North-Holland Publishing Company.
- Budiman. 2014. Analisis Komparatif Biaya Transaksi Petani Rumput Laut dalam Kontrak Lembaga Keuangan Formal – Informal dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan (Studi di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Chayanov, Alexander. 1991. The Theory of Peasant Co-operatives Translated by David Wedg wood Benn Introduction by Viktor Danilov. Ohio State University Press Columbus.
- Darmansyah dan Soebagyo, Daryono. 2010. Stimulus Ekspor Terhadap Kinerja Perusahaan-Perusahaan Batik. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 11, Nomor 2, Desember 2010, hlm.254-265.
- Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Gelora Akasara Pratama.
- Djogo, Tony; Sunaryo, Didik Suharjito dan Martua Sirait. 2003. Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri. World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Elesh, David. 1970. Poverty Theories and Income Maintenance: Validity and Policy Relevance. University of Wisconsin.
- Elizabeth, R dan Darwis, V., 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya Terhadap Program JPS di Propinsi Jawa Timur. Bali: SOCA.

- Elizabeth, R. 2007. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.
- Falianty, Telisa Aulia. 2011. Desain Kebijakan Publik Dalam Menghadapi Krisis Global. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2011.
- Fristia, Vinza Firqinia dan Navastara, Ardy Maulidy. 2014. Faktor Penyebab Belum Berkembangnya Industri Kecil Batik Desa Kenongo Kecamatan Tulangan-Sidoarjo. *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).
- Gakuru, Rhoda dan Mathenge, Naomi. 2012. Poverty, Growth, and Income Distribution in Kenya: A SAM Perspective. AGRODEP Working Paper 0001 June 2012.
- Hendri, Jhon. 2009. Riset pemasaran. Universitas Gunadarma 2009.
- Hidayat, Nanang Choirul. 2010. Bauran Pemasaran Jasa Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Progressif*, Vol.7 No.19, April 2010.
- Hira, Anil & Ron, Hira. 2000. The Institutionalism: Contradictory Notions of Change. *American Journal of Economics and Sociology*. Vol 59 No 2, April: 267-282.
- Hodgson, Geoffrey M. 1998. The Approach of Institutional Economics. *Journal of Economic Literature* Vol. XXXVI (March 1998), pp. 166-192.
- _____. 2006. What Are Institutions?. *Journal of Economic Issues* Vol. XL No. 1 March 2006.
- _____. 2009. Institutional Economics into the Twenty-First Century. *Studi e Note di Economia*, Anno XIV, n. 1-2009, pagg. 03-26.
- Hubbard, Michael. 1997. The 'New Institutional Economics' In Agricultural Development: Insights And Challenges. *Journal of Agricultural Economics* 48 (2) (1997) 239-249.

- Lissowska, Maria. 2006. New Research Problems for Institutional Economics Arising from The Experience of Transition to A Market Economy: The Evolution of Institutions. *Journal of Economics and Business* Vol. IX – 2006, No 2 (53-80).
- Lodhi, A. Haroon Akram. 1997. The Unitary Model of The Peasant Household: an Obituary?. *Economic Issues*, vol. 2, Part 1 March 1997.
- Londoño, María del Pilar. 2006. Institutional Arrangements that Affect Free Trade Agreements: Economic Rationality Versus Interest Groups. Erasmus Research Institute of Management (ERIM) Erasmus University Rotterdam.
- Mead, Lawrence M. 1996. *Poverty and Political Theory*. Department of Politics New York University.
- Musianto, Lukas S. 2002. Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2, September 2002: 123 – 136.
- Nemarundwe, Nontokozo and Kozanayi, Witness. 2002. Institutional arrangements for Water Resource Use: A Case Study from Southern Zimbabwe. Institute of Environmental Studies University of Zimbabwe.
- Novandari, Weni. 2013. Pemetaan Dan Analisis Kompetensi Inti Ukm Batik Di Kabupaten Purbalingga Dengan Pendekatan Value Chain. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 12. Nomor 01. Maret 2013.
- Nuppenau, Ernst-August. Tanpa Tahun. *Rural Development and The Heritage of Chayanov and Georgescu-Roegen: on Labour Intensive Agriculture and Peasants*. Dep. of Agricultural Policy and Market Research, J.-Liebig University, Giessen, Germany.
- O'Brien, David J.; Patsiorkovski, Valeri V.; Dershem, Larry D. 1999. *Informal Institutional Arrangements and The Adaptation of Russian Peasant Households To a Post-Soviet Economy*. Prepared for the annual meetings of The International Society for New Institutional Economics Washington, D. C. September 16-18, 1999.
- Olomola, Aderibigbe S. 2010. *Agribusiness Sector and Implications for Pro-Poor Growth*. Discussion Paper Series Thirty Seven April 2010 IPPG Discussion Papers.

- Parada, Jairo J. 2001. Original Institutional Economics: A Theory for the 21st Century?. *Oeconomicus*, Volume V, Fall 2001.
- _____. 2002. Original Institutional Economics and New Institutional Economics: Revisiting the Bridges (Or the Divide). *Oeconomicus*, Volume VI, Fall 2002.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- Prasetyo, Azhar. 2007. *Batik Banyuwangi*. Banyuwangi: Dewan Kesenian Blambangan.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ruser, John; Pilot, Adrienne; Nelson, Charles. 2004. Alternative Measures of Household Income: BEA Personal Income, CPS Money Income, and Beyond. The Federal Economic Statistics Advisory Committee (FESAC) on December 14, 2004.
- Sameti, Majid; Esfahani, Rahim Dallali; Haghghi, Hassan Karnameh. 2012. Theories of Poverty: A Comparative Analysis. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* Vol. 1, No. 6 February 2012.
- Setboonsarng, S.; Leung, P.S.; Cai, J. 2008. Impacts of Institutional Arrangements on the Profitability and Profit Efficiency of Organic Rice in Thailand. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 57-65.
- Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, Volume 11, No.2 / Desember 2011.

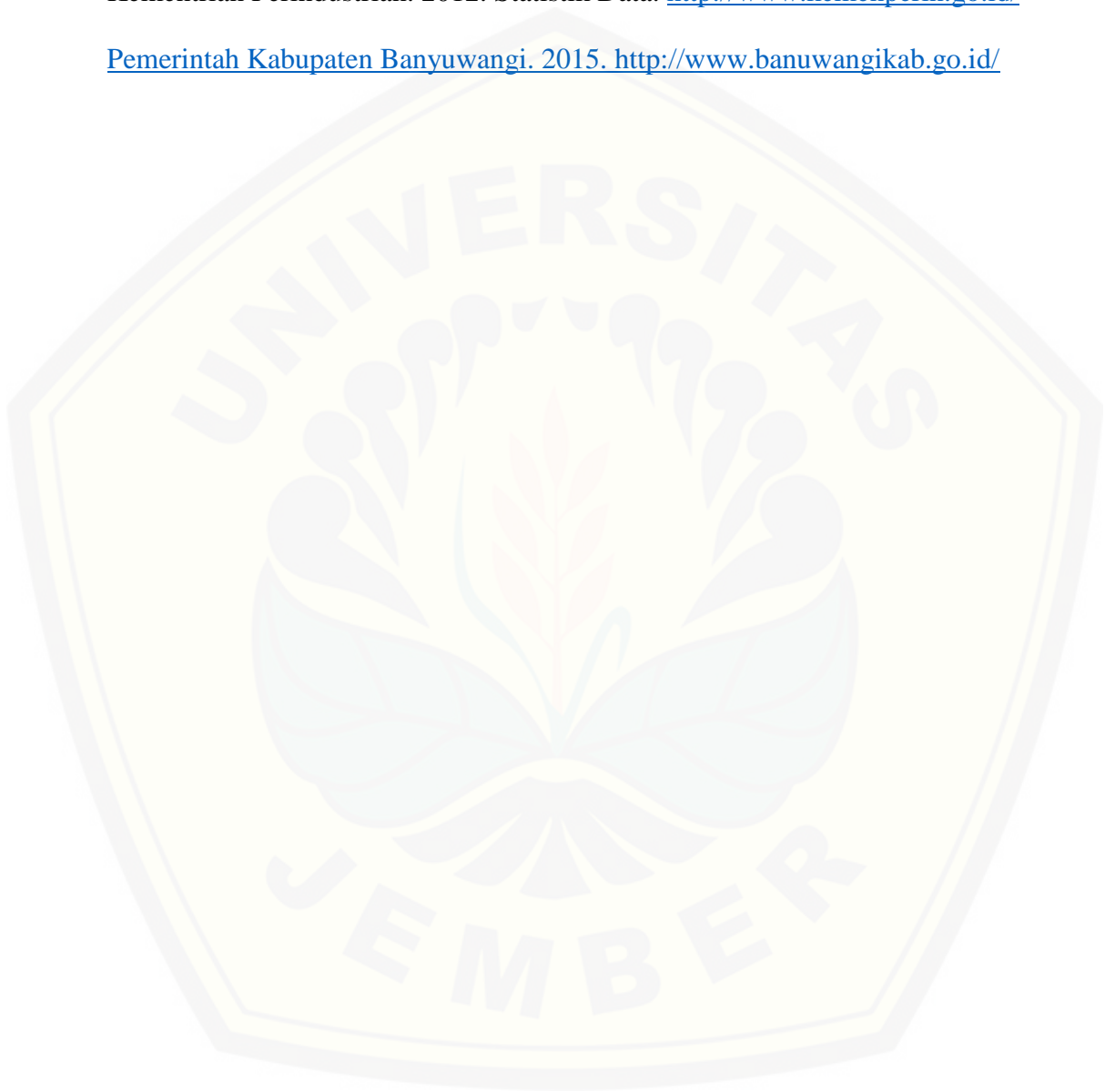
- Suhaimi, Uzair. 2010. Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro: Beberapa Isu Strategis. UNFPA Mataram 2010.
- Suryana. 2010. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia Buku Ajar Perkuliahan.
- Valentin, Erhard K. 2005. Away With SWOT Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instead. *The Journal of Applied Business Research* – Spring 2005 Volume 21, Number 2.
- Verdiany, Lidia Tiatira; Bramantijo; Sutanto, Ryan Pratama. Tanpa Tahun. Perancangan Kemasan Produk Rumah Batik Sritanjung Banyuwangi. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, Surabaya dan Program Studi Seni Rupa, STK Wilwatikta Surabaya.
- Wardani, Dewi Kusuma. 2012. Produktivitas UMKM Batik Sragen Berbasis Nilai Lokal. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, TH. 17, NO.2, Juli 2012.
- Wardhono, Adhitya *et al.* 2009. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Widyaningrum, Diana Elma. 2012. Strategi Pemasaran Kampung Batik Laweyan Solo. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Williamson, Claudia R. 2009. Informal Institutions Rule: Institutional Arrangements and Economic Performance. *Public Choice* (2009) 139: 371–387.
- Williamson, Oliver E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stocks Lookin Ahead. *Journal of Economic Literature* Vol. 38, No 3 Sept 2000, 595 – 613.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Zenger, Todd R; Lazzarini, Sergio G.; Poppo, Laura. 2001. Informal and Formal Organization in New Institutional Economics. John M. Olin School of Business Washington University; Pamplin School of Business Virginia Tech.

Bank Indonesia. 2012. Statistik Data. <http://www.bi.go.id/>

Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Data. <http://www.bps.go.id/>

Kementrian Perindustrian. 2012. Statistik Data. <http://www.kemenperin.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2015. <http://www.banuwangikab.go.id/>



HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana perkembangan IKM batik di Banyuwangi?

Bpk Joko (Desperindag Banyuwangi):

Banyuwangi mengembangkan industri batik didukung dengan adanya kebijakan yang dicanangkan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain adanya asosiasi pengrajin batik juga didukung dengan program-program pemerintah tentang pariwisata yang mengangkat tentang industri batik

2. Kapan ibu menekuni industri batik?

Ibu Fonny (3 Oktober 2015)

Usaha batik yang sekarang saya tekuni adalah warisan dari keluarga yang telah dirintis sejak tahun 1995 lalu berkembang terus sampai sekarang

Saya dulu memulai usaha dengan membeli kain mori sendiri kemudian saya jadikan batik lalu saya coba memasarkan ke luar jawa sebab saya dulu bekerja di luar jawa jadi sekalian mencoba menjual batik, ternyata batik yang saya jual laku dan banyak permintaan, kemudian sejak tahun 1987 saya mulai memproduksi batik sendiri sampai besar seperti sekarang

3. Berapa jumlah tenaga kerja IKM batik?

Ibu Fonny Meliyasari berikut ini :

“ Usaha batik saya telah memiliki pekarja sebanyak 25 orang yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu toko 1 orang pekerja, bagian gambar 1 orang, bagian cap sebanyak 2 orang pekerja, cathing dan pewarnaan sebanyak 21 orang dan penjahit sebanyak 1 orang pekerja

4. Apakah yang ibu peroleh dari industri batik ini?

Ibu Fonny Meliyasari berikut ini :

“Kalau kepemilikan rumah, dulu saya masih ikut keluarga, trus sekarang saya sudah bisa memiliki rumah sendiri, ya semua itu dari keuntungan usaha batik yang saya kelola Bu

5. Bagaimana keadaan produksi sebelum ada kebijakan pemerintah tentang batik di Banyuwangi?

Dulu sebelum ada kebijakan pemerintah produksi batik saya tidak mengalami peningkatan karena dulu cuma membuat untuk pemenuhan ekonomi saja, asal batiknya laku sudah cukup. Ya inginnya bisa maju tapi tidak tahu bagaimana memulainya

6. Bagaimana perkembangan usaha batik yang dijalani selama ini?

Bapak Firman

Ya usaha batik yang saya tekuni belum bisa meningkat, walaupun usaha batik saya merupakan warisan keluarga namun tidak bisa sampai besar. Keterbatasan modal yang biasanya menjadi penyebab tidak meningkatnya batik saya. Kalau pinjam bank takutnya tidak bisa bayar cicilan nanti malah menjadi beban lagi dan kesulitan memberikan jaminan

7. Bagaimana kondisi usaha bapak sebelum ada kebijakan pemerintah?

Kalau dulu batik mengalami kemunduran karena kurangnya informasi bagi pengusaha batik sendiri baik dalam membuat jaringan pemasaran yang baik maupun promosi karena sekarang banyak sekali produksi batik yang lebih murah, bagus jd bisa mempengaruhi produksi batik. kalau batik saya kan khusus batik klasik jadi punya ciri khas sendiri bila dibandingkan dengan batik-batik lain

8. Bagaimana perubahan pendapatan yang terjadi sebelum industri batik mendapat perhatian pemerintah?

Ibu Fonny

Produksinya hanya nunggu permintaan saja itupun hanya tertentu, otomatis pendapatan juga tidak terlalu signifikan kenaikannya setiap bulan, kecuali even-even tertentu yang membuat batik terjual banyak

9. Bagaimana perubahan penjualan yang terjadi sebelum industri batik mendapat perhatian pemerintah?

Ibu Fonny

Kalau dulu, mau jualan agak susah banyak yang belum kenal, terus saingan banyak dari luar daerah yang batiknya sudah terkenal

10. Bagaimana penjualan yang terjadi sebelum industri batik mendapat perhatian pemerintah?

Bapak Firman

Dulu sebelum ada aturan pegawai pakai batik, jarang sekali orang beli batik. Cuma buat acara tertentu saja, karena itu pendapatan kita tidka terlalu berkembang banyak

11. Perubahan pendapatan terjadi setelah industri batik mendapat perhatian pemerintah?

Bapak Suyadi

Semenjak ada peraturan bapak bupati, lumayan omset kita naik, Bu, pegawai mau tidak mau beli kain batik untuk seragam. Hal itu menunjang penjualan kami

Bapak Firman

Lumayan, pengrajin batik terbantuan adanya peraturan tersebut, tambah naik pendapatan kita

Bapak Suyadi

Semenjak ada kebijakan batik terbentuk Asosiasi Pengusaha Batik sehingga industri batik saya mengalami peningkatan bu, seperti kalau dulu tu tidak ada toko, tapi kini saya membuka toko. Meningkatnya industri batik saya tidak hanya terbatas pada membuka toko saja bu, tapi juga pada peningkatan pendapatan dan produksi

12. Apakah manfaat adanya asosiasi pengusaha batik terhadap kemajuan industri batik?

Manfaat Asosiasi Pengusaha Batik ada bu bagi batik Sayu Wiwit ini, seperti dulu kan batik saya tidak membuka toko tapi terus Asosiasi Pengusaha Batik menyarankan agar usaha batik di Banyuwangi membuka toko untuk mempromosikan batik kita juga. Selain itu juga bu ada peningkatan produksi, pemasaran apalagi kalau tahun ajaran baru dan hari bersejarah kota misalkan hari batik nasional atau hari jadi Banyuwangi bisa ramai toko saya

Lampiran 4

DOKUMENTASI

FOTO FGD DENGAN ANGGOTA ASOSIASI BATIK BANYUWANGI



FOTO FGD DENGAN ANGGOTA ASOSIASI BATIK BANYUWANGI



FOTO WAWANCARA DENGAN BAPAK FIRMAN



FOTO WAWANCARA DENGAN BAPAK AMRIN



FOTO WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BATIK VIRDES COLLECTION



FOTO WAWANCARA DENGAN BU SUSI



